

Warta

PERTANIAN

VOLUME IX/EDISI SEPTEMBER 2019

Menuju Kedaulatan Pangan



PERETAN PRESTASI MENTAN AMRAN MENJELANG BERAKHIR MASA JABATAN
ADA AWAL
ADA AKHIR

**MENARIK INVESTASI,
MENDORONG
EKSPOR**



PENGARAH:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

PELAKSANA:

Abiyadun, SE, MM

ANGGOTA:

Dra. Ria Satiti

Imam Santoso, SE

Alice Raga Dewi, S.Sos

Hendrayani Yacub, S.Sos

Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin

Majalah Warta Pertanian

SALAM REDAKSI

**MENINGGALKAN
KEBAIKAN**



IBARAT peribahasa 'gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama'. Artinya, orang yang baik akan meninggalkan nama baik dan orang jahat akan meninggalkan nama buruk yang tercemar.

Menjelang masa akhir jabatan pada 20 Oktober 2019, seiring dengan pelantikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin untuk Periode 2019-2024, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah banyak meninggalkan kebaikan dan prestasi dalam mengembangkan sektor pertanian dalam negeri.

Prestas-prestasi itu salah satunya investasi atau penanaman modal. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta pada akhir September 2019, Presiden RI Jokowi menitikberatkan investasi. Ini mengingat investasi menjadi kunci utama bangsa ini, terutama dalam menangkis eskalasi perubahan global yang akan membuat sejumlah negara mengalami resesi.

Berbicara soal investasi, sektor pertanian membubuhkan prestasi gemilang. Di bawah komando Mentan Amran, selama kurun waktu 2014-2018, investasi justru meningkat tajam menjadi Rp240,8 triliun atau naik 150,7 persen dibandingkan dengan periode 2009-2013.

Pada kurun 2009-2013, investasi sektor pertanian masih sangat rendah, yakni hanya Rp96,1 triliun. Ini dikarenakan beberapa kendala antara lain proses perizinan yang sangat sulit, terutama untuk proses pelepasan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU). Proses pelepasan tanah itu hampir tak memiliki kepastian baik menyangkut waktu pengurusannya maupun penetapan biayanya.

Karenanya, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Mentan Amran membuat strategi, salah satunya mencanangkan Program Percepatan Investasi Sektor Pangan dan Pertanian. Sejak lima tahun belakangan, Kementan memang fokus menarik investasi dan mendorong laju ekspor. Bahkan peraturan yang menghambat pun dipangkas. Kementan sudah merevisi regulasi yang ada dan saling tumpang tindih. Setidaknya ada 241 Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) yang dicabut lantaran dinilai menjadi penghambat ekspor.

Selama ini, peraturan yang menangani investasi di sektor pertanian cukup jelas. Dari UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden (Perpres) No 91/2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha. Kemudian, Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 707/2017 tentang Satgas Percepatan Berusaha Lingkup Kementan, PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Permentan No 40/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Dengan diperkuat Permentan No 40/2019 tentu terjadi perubahan paradigma. Yang tadinya ke arah birokrasi, sekarang lebih menekankan ke standar dan persyaratan.

Dampak pencabutan peraturan yang tumpang tindih itu telah berimbas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan ekspor. Lonjakan PDB terjadi pada 2018 yang mencapai Rp1.000 triliun. Naik cukup pesat dibandingkan pada 2014 yang hanya Rp800 triliun.

Investasi sektor pertanian juga terus naik mencapai 110 persen dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS). Bahkan Mentan Amran optimistis, potensi investasi bisa naik sampai 500 persen. Selamat Pak Mentan Amran! (*)



4



12



17



40



48

5

Situasi ekonomi global yang melambat dan banyak negara-negara masuk dalam resesi ekonomi menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

12

Proses perizinan investasi bidang pertanian yang cepat merupakan upaya guna mendorong tumbuhnya gairah pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan.

17

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik investasi ke dalam negeri. Ini yang dilakukan Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian Pertanian (Kementan) Banun Harpini saat menghadiri rangkaian kegiatan National Professional Practice Exam (NPPE) 2019 di Amerika Serikat (AS).

18

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong ekspor berbagai komoditas Indonesia agar terus menembus pasar dunia.

27

Setiap perjalanan selalu ada awal dan ada akhir. Itulah yang dilakoni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) RI.

30

Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September, bermula dari ditetapkannya Undang-Undang (UU) No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) oleh Presiden RI Soekarno.

40

"Hidup Pertanian Indonesia! Hidup Pak Menteri! Hidup Petani Indonesia! Hidup mahasiswa!".

50

Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi kerja sama perbenihan antara negara-negara yang tergabung Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).



Strategi Kementan Atasi Resesi Ekonomi Global

MENARIK INVESTASI, MENDORONG EKSPOR



Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus dalam menarik aliran modal investasi. Di sektor pertanian, selama 2014-2018 investasi justru meningkat tajam menjadi Rp240,8 triliun atau naik 150,7 persen dibandingkan dengan Periode 2009-2013.

SITUASI ekonomi global yang melambat dan banyak negara-negara masuk dalam resesi ekonomi menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, Indonesia harus berpacu dengan waktu dan bergerak lebih cepat untuk memangkas dan menyederhanakan regulasi yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.

Presiden Jokowi bahkan menyindir perizinan investasi di dalam negeri sangat tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Negara lain memberikan karpet merah bagi investor, sedangkan Indonesia justru menjejali investor dengan aturan yang ruwet. "Padahal investasi menjadi kunci utama dalam menangkal eskalasi perubahan global yang akan membuat sejumlah negara mengalami resesi," ujarnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) dengan tema Investasi di Istana Negara, akhir September 2019.

Lantas bagaimana perkembangan investasi di sektor pertanian? Sejak lima tahun belakangan, Kementerian Pertanian (Kementan) fokus menarik investasi dan mendorong laju ekspor. Berbagai strategi diluncurkan. Bahkan peraturan yang menghambat pun dipangkas.



Banyak yang ingin investasi di sektor pertanian. Bayangkan saja, dari 300 (investasi yang masuk, red), baru 10 yang terealisasi. Kalau direalisasikan 100 perusahaan saja, investasi pada 2019 bisa tembus Rp70 triliun,"

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian

Kementan di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman sudah merevisi regulasi yang ada dan saling tumpang tindih. Setidaknya ada 241 Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) yang dicabut karena dinilai menjadi penghambat ekspor.

"Dengan pencabutan peraturan yang tumpang tindih itu telah berimbas pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan ekspor. Lonjakan PDB terjadi pada 2018 yang mencapai Rp 1.000 triliun. Naik cukup pesat dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp 800 triliun," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Amran.

Investasi sektor pertanian yang terus naik 110 persen dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS). Bahkan Amran optimistis, potensi investasi bisa naik sampai 500 persen. "Banyak yang ingin investasi di sektor pertanian. Bayangkan saja, dari 300 (investasi yang masuk, red), baru 10 yang terealisasi. Kalau direalisasikan 100 perusahaan saja, investasi pada 2019 bisa tembus Rp70 triliun," tuturnya.

Dari segi ekspor, berdasarkan data dari BPS, ekspor diperkirakan naik 9 juta ton dari 2018. Bahkan ditargetkan pada 2019 ini ekspor mencapai 45 juta ton. Jika dibandingkan pada 2013 yang hanya 10-11 juta ton. "Tentunya ini lompatan besar," tandas Amran.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Erizal Jamal menambahkan, peraturan yang menangani investasi di sektor pertanian cukup jelas. Dari UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden (Perpres) No 91/2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha.

Ditambah lagi, Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 707/2017 tentang Satgas Percepatan Berusaha Lingkup Kementan, PP No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Permentan No 40/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. "Dengan diperkuat Permentan No 40/2019 tentu terjadi perubahan paradigma. Yang tadinya ke arah birokrasi, sekarang lebih menekankan ke standar dan persyaratan," jelasnya.

Di dalam Permentan No 40/2019, permohonan dan layanan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui OSS, sehingga perizinan dengan sistem online. "Dengan OSS ini memang jauh lebih terstruktur, cepat, transparan dan tidak ada penyimpangan," terang Erizal.

Ketika belum OSS, lanjut dia, izin usaha diberikan dengan hanya pemenuhan komitmen. Lalu waktu yang dibutuhkan rata-





rata 30 hari dan syarat-syaratnya harus seluruhnya dipenuhi. Dengan OSS, izin usaha dibagi menjadi empat tipe pemenuhan komitmen. "Waktunya tergantung tipe izin usaha, tetapi tidak sampai 30 hari, yakni sekitar lima-15 hari," katanya.

Menurut Erizal, persyaratannya tidak harus dipenuhi di awal, melainkan dapat dipenuhi setelah izin usaha terbit dengan batasan waktu yang telah diatur. "Jadi nanti peran pusat (Kementerian Pertanian, red) akan lebih dominan melakukan pengawasan setelah izin usaha terbit agar penerima izin usaha sambil menjalankan usahanya, bisa memenuhi persyaratan," paparnya.

Pintu Karantina

Sebagai pintu terakhir keluar produk Indonesia ke pasar global, Badan Karantina Pertanian (Barantan) juga telah mengambil langkah. "Terobosan dan inovasi merupakan salah satu dari lima kebijakan strategis Kementan dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian," kata Kepala Barantan Ali Jamil.

Barantan meluncurkan kebijakan untuk mempermudah ekspor. Pertama, menambah negara mitra dagang dengan cara bekerja sama dan harmonisasi aturan perkarantinaan baik bilateral maupun multilateral. Barantan bertanggung jawab terhadap dokumen Sanitary and Phyto Sanitary (SPS).

Saat ini, kata Ali Jamil, paling tidak sudah empat negara menggunakan dokumen SPS secara elektronik atau via online yakni, Belanda, Australia, New Zealand, dan Vietnam. "Pada 2020 paling tidak sekitar 20 negara Uni Eropa berkomitmen akan menggunakan secara elektronik untuk dokumen SPS-nya. Jadi dokumen dikirim terlebih dulu, dan sudah terjamin produk kita diterima oleh negara tujuan," ucapnya.

Kedua, mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui

Program Ayo Galakkan Ekspor Pertanian Generasi Milenial Bangsa (Agro Gemilang). Ketiga, mendorong tumbuhnya investasi dibidang industri agribisnis. Keempat, meningkatkan frekuensi pengiriman, sesuai dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh UPT.

Kelima, menambah ragam komoditas ekspor dengan mendorong ekspor dalam bentuk jadi. Untuk itu, dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder menggali potensi daerah melalui aplikasi iMace (Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export). "Jadi kita punya peta info komoditas pertanian. Dimana lahannya, siapa petani dan eksportirnya, kemana negara tujuannya, berapa jumlah dan kapan dikirim," tambahnya.

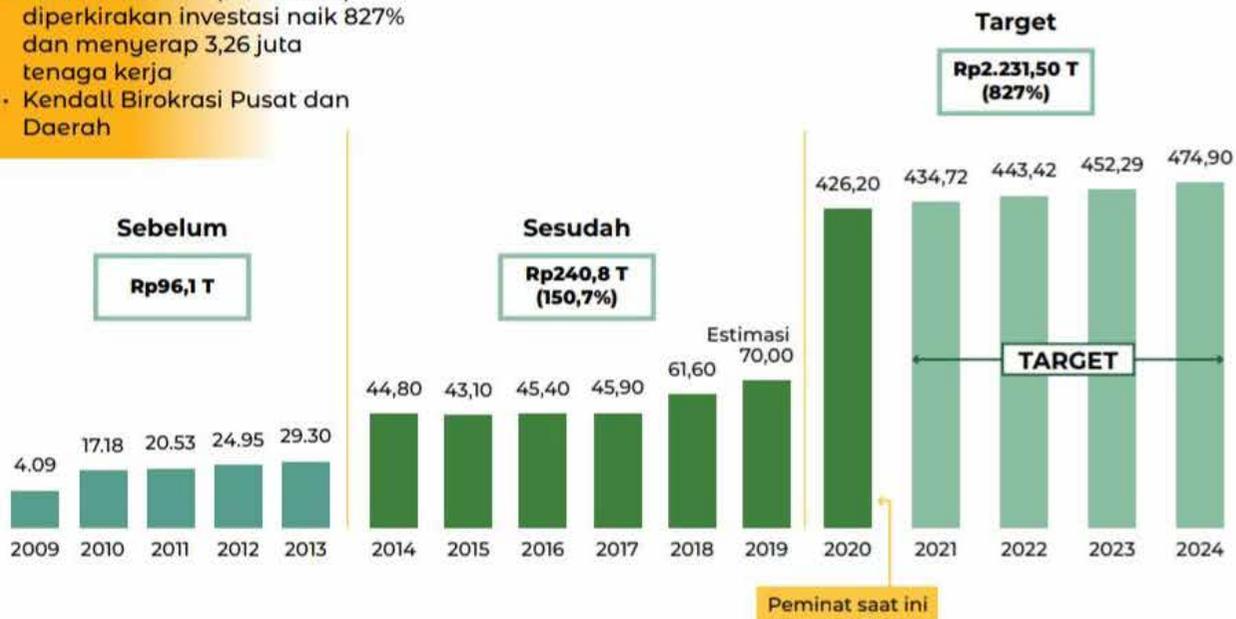
Bahkan melihat pertumbuhan kinerja ekspor yang ada, Kementan melalui Karantina Pertanian terus memacu kinerja ekspor melalui inovasi layanan. Salah satunya menyiapkan inovasi aplikasi 'Satu Klik' atau 'One Click One Go', yang merupakan inovasi layanan percepatan ekspor berbasis online.

Dengan inovasi layanan, pelaku agribisnis cukup datang sekali pada saat pembayaran dan pengambilan dokumen Phytosanitary Certificate (PC), sehingga dapat menghemat waktu. Selain itu, pihaknya juga telah menerapkan pemeriksaan karantina di lokasi gudang pemilik. Hal ini diharapkan dapat mempercepat arus barang di tempat pengeluaran baik di pelabuhan maupun di bandara.

Penerapan sistem pemeriksaan karantina 'jemput bola' ini tidak saja untuk percepatan proses bisnis ekspor, namun juga menjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian, sehingga dapat menekan angka penolakan produk akibat adanya hambatan teknis. "Ini yang sangat kami jaga, pemeriksaan karantina yang akurat, produk harus memenuhi standard SPS, produk diterima dan eksportir tidak rugi," kata Ali Jamil.

NILAI INVESTASI PERTANIAN TAHUN 2009-2024

- Peminat 1.636 perusahaan
- Selama 5 tahun (2020-2024) diperkirakan investasi naik 827% dan menyerap 3,26 juta tenaga kerja
- Kendall Birokrasi Pusat dan Daerah

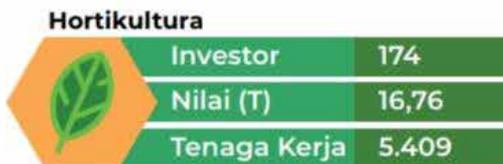
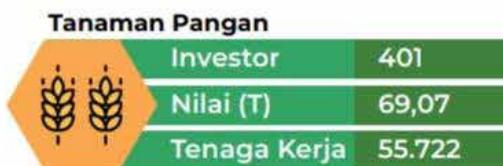
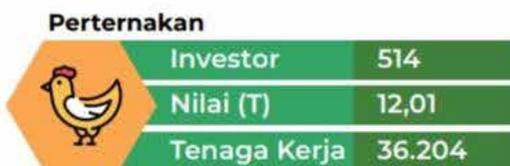
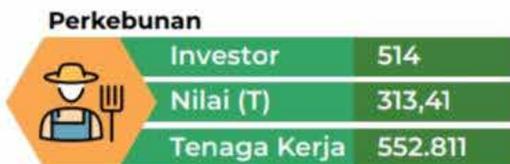


Investasi Naik Tajam

Kementerian Pertanian (Kementan) menciptakan program-program terobosan untuk meningkatkan dan mempercepat proses investasi sektor pangan dan pertanian. Investasi dan ekspor merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kurun waktu 2009-2013, investasi sektor pertanian masih sangat rendah, yakni hanya Rp96,1 triliun. Ini disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi selama ini antara lain akibat proses perizinan yang sangat sulit, terutama untuk proses pelepasan lahan, dan Hak Guna Usaha (HGU). Proses pelepasan tanah itu hampir tak memiliki kepastian baik menyangkut

PEMINAT INVESTASI SEKTOR PERTANIAN 2020





waktu pengurusannya maupun penetapan biayanya.

Meski demikian, Kepala Biro Humas dan Informasi Kementan Kuntoro Boga Andri menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan rentang waktu 2014-2018, di mana investasi sektor pertanian meningkat tajam menjadi Rp240,8 triliun atau naik 150,7 persen dibandingkan dengan periode 2009-2013. Bahkan dalam lima tahun mendatang, dalam kurun 2019-2024 investasi di sektor pertanian ditargetkan menjadi Rp2.231,5 triliun atau meningkat 827 persen dibandingkan dengan Periode 2014-2018. Selain itu, tenaga kerja sektor pertanian juga ditargetkan meningkat 3,26 juta atau naik 8,4 persen.

“Untuk mencapai target-target itu, Kementan dibawah komando Mentan Amran Sulaiman membuat berbagai program Percepatan Investasi Sektor Pangan dan Pertanian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Tujuan program percepatan investasi ini adalah pertama, mempercepat proses investasi sektor pertanian, baik untuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). “Kedua, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha,” tutur Kuntoro.

Selama ini terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan investasi di sektor pertanian. Pertama, menyangkut proses perizinan yang



sulit, bertele-tele dan tanpa kepastian biaya. Kedua, implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) antara pusat dan daerah yang tidak sinkron. Ketiga, pengembangan infrastruktur yang tidak sinkron dengan kegiatan investasi. Dan, keempat, tenaga kerja yang kurang terampil dan produktivitasnya yang rendah.

Karena itu, Kuntoro menyatakan, atas arahan Presiden Jokowi, Mentan Amran berupaya keras mengatasi kendala-kendala itu dengan solusi yang tepat. Untuk mengatasi masalah perizinan, Kementan menyediakan fasilitas izin induk operasional, dengan ketentuan kewajiban pemenuhan persyaratan dilakukan setelah kegiatan usaha berjalan dan terus meningkatkan transparansi kepastian waktu dan biaya proses perizinan. “Untuk mengatasi masalah NSPK, Kementan telah menyediakan Online Single Submission (OSS), dan penyeragaman NSPK antara pusat dan daerah,” ujarnya.

“Selanjutnya, untuk mengatasi masalah infrastruktur, Kementan berusaha menyediakan infrasturktur utama secara tepat waktu dan

sesuai dengan fungsinya,” pinta Kuntoro.

Sedangkan solusi untuk mengatasi persoalan tenaga kerja, beber Kuntoro, Kementan berupaya menyiapkan tenaga kerja terampil melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, Kementan juga menciptakan program-program terobosan untuk percepatan investasi.

Selain menciptakan layanan OSS tadi, Kementan juga melakukan sistem pengembangan investasi terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya,

pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Yang jelas, kami tidak henti-hentinya melakukan terobosan kebijakan, terutama yang menyangkut proses ekspor, perbaikan sistem layanan karantina, membangun kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan budaya, serta peningkatan efisiensi biaya produksi dan daya saing melalui modernisasi pertanian,” ujarnya, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, lanjut Kariyasa, pihaknya juga melakukan diplomasi untuk memperluas jenis



melakukan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, juga terus berupaya menyediakan fasilitas yang makin mempermudah proses investasi. “Dengan berbagai program terobosan itu, investasi di sektor pangan dan pertanian akan terus meningkat mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Kuntoro.

Ekspor Melesat

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Ketut Kariyasa menyatakan bahwa saat ini pemerintah terus memperbaiki semua layanan yang berkaitan dengan izin dan kemudahan ekspor. Upaya ini bahkan sudah dilakukan sejak empat setengah tahun terakhir untuk memacu

komoditas dan tujuan pasar ekspor ke negara-negara baru. Ini dilakukan mengingat investasi dan ekspor merupakan motor penggerak utama ekonomi nasional. “Hasil nyata dari kerja keras dan keseriusan Kementan dalam mendorong ekspor ini terlihat jelas dari peningkatan ekspor selama Januari-Juli 2019 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Karena itu, kebijakan ini harus ditangani serius,” katanya.

Kariyasa menjelaskan, selama Januari-Juli, ekspor produk pertanian meningkat sebesar 3,0 persen. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan Januari-Juli 2018 yang hanya 22,71 juta ton atau meningkat menjadi 23,39 juta ton. Selain itu, pada Januari-Juli 2019, Indonesia juga tercatat mengalami surplus perdagangan produk pertanian sebesar USD 4,25 miliar atau setara

Rp61,52 triliun.

"Bukan hanya itu, kinerja ekspor produk pertanian selama 2014-2018 juga sangat membanggakan. Ini terlihat pada 2013, dimana ekspor produk pertanian Indonesia masih bertengger pada angka 33,5 juta ton. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, angkanya terus meningkat," katanya.

Sementara itu, kemampuan Kementan yang selama lima tahun terakhir berhasil menembus lonjakan produk pertanian merupakan bentuk usaha menjadikan ketahanan pangan Indonesia kuat. "Itu semua kan

karena keuletan dan gigihnya Mentan Amran Sulaiman mengurus kekayaan pangan kita. Supaya pangan Indonesia berdaulat," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, Kamis (12/9/2019).

Dia menuturkan, penyebab lain meningkatnya ekspor produk pertanian kurun waktu lima tahun terakhir ini, sebab Kementan menggandeng petani menjadi mitra strategis. "Kementan itu bisa mengakomodir kemauan petani, sehingga meningkatkan produksinya. Jadinya petani terbantu dan ada hasil tinggi diberikan oleh petani," ungkapnya. **(tim humas)**





WUSSS...

KECEPATAN IZIN INVESTASI DAPAT APRESIASI

PROSES perizinan investasi bidang pertanian yang cepat merupakan upaya guna mendorong tumbuhnya gairah pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan. “Kita apresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempermudah proses izin investasi agar lebih mudah dan cepat ke investor,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roslani di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Dia menyampaikan bahwa upaya itu bukan hanya sekadar klaim dari Kementan. Pasalnya, banyak investor daerah yang kebetulan bergabung di Kadin mengakui jika selama ini hampir tidak mengalami kendala saat proses perizinan investasi. “Dengan adanya proses perizinan investasi yang diupayakan selalu cepat oleh Kementan, ini akan berkontribusi meningkatkan ekonomi daerah dari pertanian,” ucap Rosan.

Untuk ke depannya, dia mengimbau supaya komitmen kemudahan izin investasi dari Kementan tetap dipertahankan. Begitu pula pemerintah daerah agar membantu proses kemudahan investor pertanian ketika akan masuk.

Mengacu pada data yang ada, realisasi investasi di sektor pertanian sejak 2014-2019 ketika Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mulai menjabat mencapai Rp240,8 triliun. Nilai investasi pertanian terakhir pada 2017 dan 2018 masing-masing hingga berjumlah Rp45,9 triliun dan Rp61,6 triliun. Catatan kenaikan angka investasi pertanian sejak 2014-2019 terhitung hingga 110 persen.

Amran menargetkan, pada 2019 angka investasi sektor pertanian lebih melejit lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amran Sulaiman ingin investasi pertanian 2019 mampu menembus Rp80 triliun.

Di tempat terpisah, Suharyo Husein dari Kadin menyebutkan, sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama ini, yakni Rp7,1 triliun. "Populasi 260 juta jiwa dan tingkat konsumsi pangan yang tinggi menjadi pendorong investasi di sektor pangan terkerek," ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Investasi Bidang Tanaman Pangan di Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9/2019) malam.

Karena itu, lanjut Suharyo, ada beberapa usulan kebijakan guna menderaskan investasi khususnya di bidang tanaman pangan. Misalnya, penyediaan lahan bagi perluasan produksi, menyediakan infrastruktur pendukung, mempercepat perluasan dan peningkatan kapasitas pelabuhan, peningkatan produktivitas, menghapus bea masuk atas impor beberapa produk dan penguatan kemampuan pemasaran. "Contoh konkretnya bentuk Food Estate terutama corn estate sebagai salah satu alternatif," bebernya.

"Investasi dengan ekstensifikasi ini bisa dilakukan baik dengan pola inti plasma, maupun kerja sama penuh dengan petani," tambah Suharyo.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyatakan, sesuai arahan Mentan Andi Amran Sulaiman, pihaknya bertekad memperluas investasi di bidang tanaman pangan. Tercatat, neraca perdagangan sektor pertanian surplus USD 11 miliar. Kendati demikian, Kementan

tetap mendorong investasi dan ekspor sektor pertanian.

"Petani kalau disuruh membangun usahatani sendiri pasti kesulitan, maka perlu adanya investasi untuk membangun sektor tanaman pangan. Potensi yang ada di tanaman pangan tidak hanya dari sisi onfarm saja tapi juga hilir," ungkapny.

Suwandi membeberkan, ada beberapa langkah nyata guna percepatan ekspor dan investasi, salah satunya dengan membangun industri pertanian di desa. Terobosan ini akan menciptakan keseimbangan kota dan desa. Desa dikembangkan menjadi industrialisasi berbasis agro karena lebih dekat bahan baku, tenaga kerja dan lahan tersedia, plus didukung infrastruktur, kota menjadi pusat pasarnya. "Hubungan desa-kota semakin kuat. Demikian juga halnya untuk Jawa dan luar Jawa, wilayah Barat dan Timur, hubungan ekonomi menjadi semakin seimbang," jelasnya.

Ke depannya, sambung Suwandi, tidak ada lagi remote area, namun daerah pelosok mulai dikembangkan dengan melihat potensi sumberdaya di masing-masing wilayah.

Suwandi menyebutkan berbagai peluang investasi yang menarik di bidang tanaman pangan antara lain industri perbenihan, pupuk organik dan pestisida hayati ramah lingkungan, budidaya jagung skala luas corn estate dan berbagai jenis industri olahan. Selain itu, korporasi multi komoditas lengkap hulu hingga hilir seperti kebun





jagung beserta industri jagung pakan dan ternak.

“Ini sebagai langkah awal yang lebih baik untuk mengembangkan usaha tanaman pangan. Sama halnya dengan Bapak Menteri Pertanian Amran yang sedang intensif mendorong investasi, kita pun harus mulai dengan mempermudah perizinan,” tuturnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahliil Lahadalia mengatakan, tingginya investasi merupakan salah satu faktor utama guna mendorong kesejahteraan ekonomi Indonesia, terutama untuk masyarakat di kota dan daerah. “Ketangguhan sebuah negara, seperti Indonesia, dapat dilihat dari ekonominya stabil. Investasi di berbagai sektor bisnis apapun, termasuk pertanian, jadi penopangnya,” ujarnya, Selasa (10/9/2019).

Dengan demikian, kata Bahliil, proses masuknya berbagai investor, salah satunya di sektor pertanian, tidak boleh mengalami hambatan atau dipersulit prosesnya. “Itu juga kan pesan Presiden Jokowi supaya diberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Proses yang sulit akan membuat investor malas melirik potensi usaha di sini,” tandasnya. **(tim humas)**



AJAK PENGUSAHA BERINVESTASI DI INDONESIA



Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik investasi ke dalam negeri. Ini yang dilakukan Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian Pertanian (Kementan) Banun Harpini saat menghadiri rangkaian kegiatan National Professional Practice Exam (NPPE) 2019 di Amerika Serikat (AS).

Di sela acara, Banun dan rombongan Delegasi Republik Indonesia (Delri) melakukan kunjungan ke World Trade Center (WTC) pada 13 September 2019. "Kami bertemu pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Maryland Bidang Agribisnis. Pertemuan ini sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pasar dan nilai perdagangan ke depan," ujar Banun.

Dalam pertemuan di World Trade Center Baltimore ini, Delri diterima Mr Steve Connelly selaku Asistant Secretary Departemen Pertanian Maryland, Bidang Pemasaran Industri Peternakan dan Layanan Konsumen. Kemudian Theresa A. Brophy selaku Direktur Pemasaran Internasional.

Banun menjelaskan, Delri menawarkan produk Sarang Burung Walet (SBW) yang merupakan produk natural asli Indonesia. Produk ini memiliki potensi ekspor sebesar 1600 ton pada 2028 dengan nilai transaksi USD 1,6 miliar pertahun. "Produk kita yang memiliki keunggulan





kita dorong masuk pasar AS untuk mensuplai kebutuhan makanan specialty, industri obat dan kosmetika mereka,” katanya.

Ketua Delri ini menyampaikan Indonesia saat ini sedang melakukan berbagai reformasi nasional, terkait dengan perbaikan ekosistem investasi baik PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing), dengan serbagai kebijakan insentif untuk mendorong FDI (Foreign Direct Investment).

Indonesia mengundang investor Maryland State untuk melakukan investasi di bidang pengembangan produksi kedele secara modern, pengembangan pembibitan dan kebun buah tropis dengan teknologi budidaya maju, yang di integrasi dengan sistem warehousing dalam rantai dingin produk-produk hortikultura untuk tujuan ekspor. Selain itu, ada industri penggumukan dan prosesing daging serta industri pakan ruminansia dan unggas dengan pemanfaatan limbah sawit dan jagung yang kebutuhannya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Di tempat berbeda, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menggelar diskusi bertajuk ‘Percepatan Investasi di Bidang Pertanian’ yang merupakan juga rangkaian kegiatan dari lima sub sektor lainnya masing-masing peternakan, hortikultura, perkebunan, sarana dan prasarana serta tanaman pangan. Percepatan investasi ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian (Mentan) untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi dibidang pertanian.

Seperti diketahui, Indonesia akan memasuki masa revolusi konsumen pada 2020. Ini ditandai dengan meningkatnya populasi kelas menengah atau middle class pada tahun depan. Hal ini merupakan momentum yang secara positif akan meningkatkan daya saing untuk Indonesia di mata investor asing.

“Peluang ini harus kita sambut secara proaktif, untuk itu kita disini bersama merumuskan apa yang dibutuhkan para calon investor guna penerapan kebijakan ke depan,” kata Kepala Barantan Ali Jamil saat memberikan arahan pada diskusi tersebut di Jakarta, Rabu (18/9).

Diskusi ini dihadiri 172 calon investor dengan jenis usaha masing-masing, seperti fumigasi, peti kemas kayu, rumah walet dan industri pemrosesan sarang walet dari seluruh Indonesia.

Menurut Jamil, upaya untuk terus mempersingkat dan mempermudah proses perizinan investasi sangat diperlukan sekaligus juga dengan mempromosikan potensi dan peluang produk pertanian yang ada menjadi agenda yang penting.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Yasid Taufik menyampaikan rapat koordinasi guna menggali permasalahan atau hambatan dalam investasi dan ekspor pertanian bahwa sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), pengembangan investasi terintegrasi, pengembangan pendidikan atau pelatihan vokasi investasi, fasilitas kemudahan investasi terus didorong untuk mengembangkan iklim investasi yang baik.

Ricky Kusmayadi dari Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BKPM menyatakan bahwa produk hortikultura secara kualitas sudah baik. "Untuk masalah investasi, kami akan duduk bareng-bareng dengan Kementan, Kemenko dan kementerian terkait untuk mereview besaran minimum investasi," ujarnya.

Ricky mengingatkan Kementan perlu membuat road map arah pengembangan hortikultura. Contohnya buah-buahan, masing-masing komoditas perlu membuat klaster-klaster tertentu secara seragam sehingga dapat diketahui hitungan biaya transportasinya.

Kebijakan BKPM, setiap investasi izin usaha benih diupayakan untuk izin usaha budidaya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sertifikasi kompetensi dan mutu dapat diperoleh dan dilanjutkan dengan izin usaha produksi benih. Lahan pertanian termasuk hortikultura merupakan kategori lahan Areal Penggunaan Lain (APL). APL diperuntukkan antara lain pertanian, perumahan, perikanan, pariwisata, perdagangan, perkantoran dan lain-lain. Izin usaha agrowisata hortikultura belum ada aturan turunan tentang persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk izin usahanya. Padahal KBLI nya masuk kesektor pertanian bukan pariwisata.

Deputi Bidang Agribisnis Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wiranti menerangkan, pertanian berpotensi tinggi untuk

ekspor. Nilai Tukar Petani (NTP) komoditas hortikultura paling tinggi, yakni tinggi di atas 100 persen. PDB hortikultura berada di urutan kedua setelah perkebunan. "Saat ini ekspor dan investasi di bidang hortikultura menjadi prioritas. Berbicara defisit neraca perekonomian Indonesia solusinya adalah investasi atau melalui ekspor. Hal paling mendasar untuk dilakukan adalah melakukan mapping negara mana saja yang memiliki minat terhadap produk hortikultura Indonesia. Dengan demikian aspek hulu ke hilir harus melibatkan semua stakeholder," ujarnya.

Sementara itu, Kementan terus mendorong minat investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi gula guna memenuhi kebutuhan gula konsumsi dan gula industri serta mencapai target swasembada gula. Setidaknya sudah ada sepuluh pabrik gula baru yang dibangun pada periode 2014-2019 ini, bahkan tujuh diantaranya sudah beroperasi.

Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menyampaikan bahwa kebutuhan gula konsumsi atau gula putih sebanyak 2.8 juta ton akan terpenuhi dengan bertambahnya sepuluh pabrik gula baru. Saat ini kebutuhan gula konsumsi sebesar 2.8 juta ton dipenuhi dengan produksi nasional sebesar 2.5 juta ton dan melalui impor sebesar 300 ribu ton.

"Kita akan mulai kurangi impor gula konsumsi mulai 2020, karena kita sudah punya tambahan sepuluh pabrik gula. Sehingga kebutuhan konsumsi gula 2,8 juta ton akan terpenuhi dari produksi dalam negeri," ujarnya saat dikonfirmasi Selasa, Selasa (24/9).

Kasdi menegaskan bahwa pemerintah punya komitmen untuk menjaring investor di sub sektor perkebunan khususnya gula. Kementan terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) No 91/2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya 'Penguasa dan Birokrat' menjadi Pelayan Masyarakat'.

"Ada empat hal penting yang akan dilakukan Kementan. Pertama, pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Kementan. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS)," ujar Kasdi. **(tim humas)**





**DORONG, PACU
DAN LOBI AGAR**

MENEMBUS PASAR DUNIA

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong ekspor berbagai komoditas Indonesia agar terus menembus pasar dunia. Upaya itu di antaranya dengan meningkatkan kualitas barang serta memperbanyak jalinan lobi dengan negara-negara di dunia. "Hasilnya, sampai dengan Juli 2019 ekspor perkebunan dan peternakan kita tumbuh menyakinkan, yakni di atas empat persen jika dibandingkan pada periode bulan yang sama di tahun 2018," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan Ketut Kariyasa, Rabu (4/9/2019).

Menurut dia, secara umum ekspor pertanian pada 2019 tumbuh signifikan atau mencapai 3,0 persen. Sampai dengan Juli lalu, jumlah ekspor komoditas perkebunan Indonesia mencapai 22,9 juta ton atau naik 4,4 persen. Jumlah ini jelas lebih besar jika dibanding periode bulan yang sama pada 2018.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan kontribusi perkebunan 97,4 persen terhadap volume ekspor sektor pertanian dan berkontribusi 96,9 persen terhadap nilai ekspor sektor pertanian. Makanya tidak heran, subsektor perkebunan menjadi penyumbang devisa negara terbesar dari ranah pertanian.

Nah agar nilai ekspor perkebunan dapat meningkat, diperlukan adanya percepatan investasi. Data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di pertanian selama 2009-2013 masih rendah, yakni hanya sebesar Rp96,1 triliun. Kemudian pada periode 2014-2018 meningkat 150,7 persen atau Rp240,8 triliun. "Kalau berdasarkan data kami, untuk saat ini ada 514 calon investor yang tertarik berinvestasi di subsektor perkebunan. Itu nilainya cukup tinggi, yakni sekitar Rp 313 triliun," kata Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyo saat Silaturahmi dan Konsolidasi Percepatan Investasi Sektor Perkebunan di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Kementan hingga saat ini juga masih konsisten mendorong pengembangan budidaya talas (*Colocasia esculenta*) sebagai bahan baku ekspor. Pasar ekspor talas yang masih terbuka lebar, menjadi alasan utama pemerintah bersemangat kembangkan budidaya talas, salah satunya 'Si Beneng' talas asal Banten.

Kepala Subdirektorat Ubikayu dan Aneka Umbi Lainnya, Cornelia mengatakan, pangsa pasar talas di Jepang masih terbuka lebar karena semakin menyempitnya lahan pertanian di Negeri Matahari Terbit. "Dari luas lahannya itu, Jepang hanya bisa memenuhi 250 ribu ton per tahun, atau 65,7 persen dari total kebutuhan per tahun sebesar 380 ribu ton. Kita dorong terus petani agar mulai meningkatkan nilai tambah talas," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan melakukan langkah percepatan pacu ekspor komoditas pertanian daerah setempat.

Berdasarkan data IQFAST di Karantina Pertanian Kendari pada 2018 tercatat lalu lintas domestik delapan produk pertanian asal Sultra dengan total 1,9 juta ton. Komoditas tersebut masing-masing beras 27,3 ribu ton, kakao 990,6 ton, jahe 65,5 ton, lada 839,2 ton, cengkeh 3,04 ribu ton, 3,9 ribu ton, 45,04 ribu ton dan kacang mede 4,5 ribu ton.

Saat ini hampir seluruh eksportasi produk, kecuali kakao dilakukan tidak langsung, namun melalui Surabaya dan Makassar. Ini menjadi perhatian baik bagi pemda maupun pemerintah pusat. "Harusnya semua produk pertanian asal Sultra dapat mencontoh kakao di sini. Selain diolah lebih dulu juga diekspor langsung," kata Kepala Barantan Ali Jamil saat kunjungan di gudang PT Kala Kakao Indonesia, Kendari, Kamis (19/9/2019).

Sementara itu, kegiatan promosi dan misi dagang dalam bentuk pameran, forum bisnis dan promosi lain yang diikuti oleh para eksportir berhasil meningkatkan animo ekspor sepanjang 2019 ini. Diperkirakan peningkatan ekspor meningkat pada bulan September sampai akhir tahun, seiring dengan dimulainya masa panen buah eksotik Indonesia, seperti manggis dan mangga.

Salah satunya, PT Radja Manggis Sejati usai mengikuti pameran International Fruit Expo 2019 di Guangzhou, China pada dua bulan





lalu mendapatkan kontrak baru sebanyak 21 kontainer. Pasokan manggis mereka dapatkan dari Aceh dan Sumatera Barat. "Kontrak baru kami 21 kontainer, dengan volume per kontainer 18,8 ton manggis. Saat ini kami sudah mengirimkan pesanan sebanyak dua kali," ujar Wawan, direktur PT Radja Manggis Sejati.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara penghasil nanas terbesar dunia. Data BPS menunjukkan produksi nasional nanas pada 2018 mencapai 1,8 juta ton. Sebagian besar ekspor dalam bentuk olahan dan hanya sebagian kecil segar. Ekspor nanas segar pada 2018 Indonesia sebesar 13.366 ton atau setara kurang lebih Rp 117 miliar. Saat ini Kementan tengah membuka pasar nanas segar ke berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat dan Tiongkok.

Direktur Buah dan Florikultura, Liferdi Lukman saat berada di Tanggamus mendukung pengembangan kawasan korporasi ini. Dirinya menyatakan bahwa Ditjen Hortikultura menyiapkan program grand design pengembangan hortikultura di antaranya nanas. "Diharapkan melalui program tersebut Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai eksportir nanas no. 1 dunia. Dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan devisa negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Bagaimana dengan lada? Komoditas lada memang sejak dahulu, bahkan hingga kini menjadi incaran pasar dunia.

Salah satunya lada putih asal Bangka Belitung (Babel) yang dikenal dengan brand muntok white papper yang jadi incaran Hongkong, China, dan Eropa. Melihat peluang ekspor lada yang kian manis, Kelompok Tani (Poktan) Berkah Tani yang diketuai Alfeddy Hernandy, kian serius menggarap pasar mancanegara. Apalagi kini sudah ada beberapa perusahaan eksportir yang menawarkan diri membeli lada putih yang dibudidaya petani Babel.

"Sejumlah perusahaan eksportir tersebut umumnya minta produk lada putih muntok dalam bentuk bubuk," ujarnya.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan plasma nutfah terbesar di dunia, Indonesia menjadi tempat tumbuh berkembangnya aneka buah-buahan tropis. Data BPS, impor buah pada 2018 mencapai 646.223 ton senilai USD 1,26 miliar. Sementara ekspornya mencapai 893.539 ton, senilai USD 63,25 juta atau Rp893,65 miliar. Sepanjang Semester I 2019 (Januari-Juni 2019) volume impor buah tercatat 283.078 ton atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 313.835 ton. Pada 2018, impor Pir menempati urutan pertama sebanyak 186 ribu ton, disusul Apel 165 ribu ton dan Anggur 105 ribu ton.

Direktur Buah dan Florikultura Kementan Liferdi Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/9/2019) menegaskan bahwa mayoritas buah-buahan impor



adalah jenis buah subtropis diantaranya pir, anggur, jeruk dan apel.

Terkait sertifikasi ekspor pertanian, Kementan Barantan kembali apresiasi petani dan pelaku usaha agri bisnis di Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya pencapaian ekspor komoditas pertanian dari Sulut naik drastis. "Tahun lalu hanya sekitar 322 ribu ton, sedangkan sampai bulan ini sudah mencapai sekitar 477 ribu ton, naik selitar 148 persen dibandingkan tahun lalu," kata Ali Jamil, kepala Barantan saat melepas lima komoditas pertanian asal Sulut sekaligus dengan nilai Rp19 miliar ke mancanegara di Pelabuhan Bitung, Jumat (20/9/2019).

Selain itu, Kementan terus mencari peluang meningkatkan ekspor produk pertanian. Peluang yang saat ini digenjut, yaitu dengan menciptakan petani yang produknya siap ekspor.

"Kita siapkan petani untuk menghasilkan produknya siap ekspor, jadi kita akan dorong Balai Pelatihan yang kita miliki untuk membina petani atau pemuda-pemuda yang siap terjun ke sektor pertanian dan menghasilkan produk siap ekspor," ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Prof Dr Dedi Nursyamsi MSc usai melantik pejabat eselon III dan IV lingkup BPPSDMP di Jakarta, Jumat (30/8/2019). **(tim humas)**



EKSPOR, EKSPOR, DAN EKSPOR LAGI

KINERJA ekspor komoditas pertanian sejumlah daerah mendapat apresiasi banyak pihak, termasuk dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Salah satu yang mendapat aplaus adalah Jawa Tengah (Jateng). Amran menilai pembangunan pertanian di Jateng tidak lagi berbicara swasembada pangan, namun telah masuk fase daulat pangan berbasis ekspor. “Banyak komoditas menarik yang dapat diekspor. Kami sudah mengembangkan e-cert yang memudahkan bagi produk kita di negara tujuan. Tidak akan ada lagi penolakan produk di saat perjalanan,” ungkapnya saat lakukan inspeksi proses bisnis karantina di Depo Pelindo, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Minggu (29/9/2019).

Mentan berharap model pembangunan pertanian yang berhasil di Jateng dapat diduplikasi di daerah lainnya, sehingga ekspor komoditas pertanian semakin meningkat. “Ekspor kita meningkat 9 juta ton selama lima tahun. Dan ini capaian luar biasa,” tandasnya.

Amran mendapatkan, penjelasan bahwa di akhir triwulan ketiga 2019, nilai barang ekspor produk pertanian yang dihasilkan petani dan peternak dari Jateng mencapai Rp2,51 triliun atau meningkat 19,02 persen dibandingkan periode sama pada 2018 yang hanya mencapai Rp2,3 triliun.

Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor 135 ton produk samping jagung berupa tongkol kering senilai Rp266 juta ke Jepang, (31/8). “Menurut catatan kami sejak Januari hingga Agustus 2019 total eksportasi tongkol jagung kering mencapai 1.000 ton. Dan nilai ekonominya



mencapai Rp2 miliar. Produk tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan makin diminati pasar ekspor, “ kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Hasrul saat menyerahkan Phytosanitary Certificate, PC kepada eksportir.

Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan juga melakukan eksportasi 95 ton serabut kelapa produksi asal Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) ke Tiongkok, total nilainya mencapai Rp 200 juta. Pelepasan ekspor ini dilakukan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019).

Menurut Musyaffak, dulu serabut kelapa dianggap limbah atau hanya digunakan alat untuk mencuci piring selain busa. Namun sekarang serabut kelapa dapat dimanfaatkan untuk dibuat matras atau jok mobil dan kini diminati Tiongkok.

Kementan terus bergerak mendukung pertanian Indonesia dari hulu sampai hilir. Untuk hilir, dukungan terhadap ekspor terus dilakukan. Di Kalianak, Surabaya, Jatim, Jumat (6/9/2019), Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementan Suwandi melepaskan ekspor kacang hijau ke China dan Filipina sebanyak 35 kontainer Adapun delapan kontainer di antaranya, khusus dikapalkan ke China. Ekspornya kali ini adalah PT Aman Buana Putera. Suwandi memberikan apresiasi kepada para eksportir, termasuk

kepada PT Aman atas dukungannya terhadap produk lokal pertanian Indonesia.

Di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), ekspor manggis ke sejumlah negara terus berjalan. Buah tropis eksotik yang dikenal sebagai ‘The Queen of Fruits’ tersebut banyak diminati pasar luar negeri karena diakui bergudang manfaat. Selain daging buahnya segar, ekstraksi kulit manggis banyak menjadi bahan baku industri farmasi dan kosmetik di negara tujuan ekspor. Negara empat musim seperti China dan Eropa menjadi salah satu destinasi favorit ekspor buah-buahan tropis termasuk manggis.

“Kita kembali ekspor manggis via Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Minangkabau, melanjutkan rangkaian ekspor manggis sebelumnya. Pekan pertama September ini diberangkatkan 80 ton oleh PT Bumi Alam Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 6,5 ton diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau oleh PT Buah Segar,” ujar Direktur Buah dan Florikultura Liferdi Lukman di Padang, Minggu (8/9/2019).

Di lain pihak, tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Barantan, ekspor porang pada 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke negara Jepang, China, Vietnam, Australia, dan sebagainya.





Kepala Subdirektorat Ubikayu dan Aneka Umbi Lain, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Diitjen TP Kementan Cornelia menyatakan, Kementan tengah mendorong potensi umbi porang untuk dikembangkan lagi, sehingga volume ekspor turun meningkat. Umbi porang saat ini masih banyak yang berasal dari hutan dan belum banyak dibudidayakan. "Ada beberapa sentra pengolahan tepung porang saat ini, seperti di daerah Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung serta Maros," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Barantan kembali melepas pengiriman perdana talas beku ke Jepang sebanyak 8,85 ton. Sebelum dikirim, petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik. "Ini untuk memastikan produk tersebut aman dan layak serta bebas dari hama penyakit sesuai persyaratan sanitary dan phytosanitary dari negara tujuan," ujar Ali Jamil, kepala Barantan di Makassar, Sabtu (14/9).

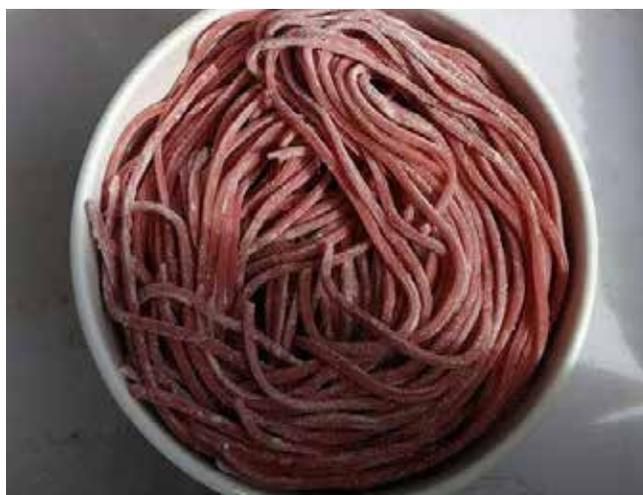
Di Jakarta, Karantina Pertanian Tanjung Priok melepas 197,5 ton ekspor produk olahan kakao berupa bubuk dan cacao butter tujuan Amerika Serikat, Brazil, dan Pakistan senilai Rp9,57 miliar. "Kami sangat mendukung tumbuhnya industri kakao Indonesia. Kita harus naik kelas, yang kita ekspor tidak lagi hanya biji kakao mentah, tapi harus berupa olahannya," ujar Ali Jamil, Kamis, (26/9).

Di Bandung, Jawa Barat (Jabar), eksportir yang bergerak di perberasan menyebutkan pangsa pasar beras ketan hitam organik Indonesia masih terbuka luas. Karena itu, pengembangan budidaya beras tersebut memiliki potensi besar untuk kebutuhan ekspor.

Demikian yang disampaikan eksportir PT Sejati Makmur, Cecep yang rutin mengekspor beras ketan hitam sejak 2011 ke Singapura saat kunjungan kerja Dirjen TP Kementan Suwandi di Desa Cipeujeuh Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jumat (20/9/2019).

Cecep mengungkapkan pada September ini perusahaannya telah mengekspor 22,5 ton ke Singapura. Adapun targetnya tahun ini bisa sampai 200 ton seperti halnya tahun-tahun sebelumnya.

Di Sidoarjo, pakan ternak asal Jatim tidak saja diminati oleh peternak setempat dan Indonesia, namun juga diminati Timor Leste. Selama September 2019, Karantina Pertanian Surabaya telah tiga kali melakukan pelepasan pakan ternak dan produk peternakan (karkas ayam) ke negara tersebut. Kegiatan eksportasi ini tidak lepas dari hasil kunjungan delegasi The Republic of Democratic of Timor Leste (RDTL) untuk melakukan Import Risk Analysis (IRA) ke beberapa perusahaan peternakan di Indonesia termasuk Jawa Timur. Kunjungan dimulai sejak awal Januari 2018 dan yang terbaru pada 2 September 2019 ke PT Sinar Indochem di Sidoarjo. **(tim humas)**





Hari Pangan Sedunia ke XXXIX 2019

**“Teknologi Industri Pertanian dan Pangan
Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045**

Kendari & Konawe Selatan - Sulawesi Tenggara
2-5 November 2019





ADA AWAL, ADA AKHIR

Deretan Prestasi Mentan Amran





SETIAP perjalanan selalu ada awal dan akhir. Itulah yang dilakoni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) RI. Menjelang berakhir masa jabatannya, Amran membeberkan sederet prestasi sektor pertanian selama hampir lima tahun memimpin Kementerian Pertanian (Kementan). Prestasi tersebut dipamerkan Amran di depan para pengurus dan anggota Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), termasuk para mantan Mentan sebelumnya.

Amran menyampaikan bahwa capaian pertanian selama ini merupakan hasil komitmen dan sinergi seluruh pihak, termasuk Keluarga Besar Kementan dan para menteri terdahulu. Capaian tersebut bahkan berhasil membawa Indonesia menjadi negara terbesar nomor lima dalam hal pertumbuhan nilai ekspor dan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Indonesia saat ini masuk menjadi negara terbesar nomor lima dalam hal peningkatan ekspor dan PDB, bahkan untuk PDB, kita terbaik nomor lima dari 224 negara di dunia," jelas Amran saat menghadiri Kongres dan Seminar Nasional PERAGI di Auditorium Sadikin Sumintawikaarta, Bogor, Jawa Barat.

Amran menegaskan, meski setiap tahun anggaran kementerian yang dipimpinannya mengalami penurunan. Ini tidak menyurutkan semangat kerjanya dalam mencetak prestasi. Terkait PDB misalnya, dalam kurun waktu 2014–2018, peningkatan PDB pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif. Pada 2013 PDB pertanian hanya sebesar Rp847,8 triliun, terus meningkat hingga Rp1.005,4 triliun pada 2018. "Bahkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita baru-baru ini mencapai 3,7 persen, angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah 3,5 persen," paparnya.

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan PDB Pertanian Indonesia adalah peningkatan ekspor. Amran menerangkan, pada kurun waktu yang sama, akumulasi nilai ekspor pertanian mencapai Rp1.957 triliun, dengan akumulasi total volume mencapai 195,7 juta ton. "Pada 2013 volume ekspor pertanian hanya 33 juta ton, pada 2018 meningkat hingga 42 juta ton, peningkatannya 9 juta ton, tahun ini kita target menjadi 45 juta ton, dibandingkan pada 2013 ekspor kita naik 10 sampai 11 juta ton," terang Amran.

Mentan menyebut, raihan PDB dan ekspor pertanian membuktikan kebijakan dan program pertanian selama ini mampu berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan kebijakan dalam mengatur rantai pasok turut mempengaruhi inflasi pangan, yang dulunya 10,57 persen menjadi 3,5 persen turun hingga 88,1 persen. "Kebijakan Online Single Submission (OSS) juga turut mendorong investasi pertanian hingga 110 persen, bahkan saat kami rasis dengan presiden beberapa waktu lalu, kami katakan investasi pertanian berpotensi naik 500 persen hingga 1.000 persen," ujar Amran.

Mengakhiri sambutannya, Mentan meminta agar semua pihak terus berjuang menjaga pertanian Indonesia, termasuk seluruh Anggota PERAGI untuk berperan aktif menciptakan inovasi dan teknologi dibidang pertanian. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan keyaninan pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. "Harus berani 'Thinking Out of The Box', saya tantang PERAGI untuk



menciptakan inovasi dan teknologi baru, ciptakan komoditas pertanian jangan yang biasa-biasa, pasti bisa, karena yang bisa mengubah pertanian adalah teknologi dan inovasi. Ilmu harus diturunkan ke bumi, kalau ilmu hanya untuk diskusi itu ilmu tidak akan jadi barang," tantangnya.

Di tempat terpisah, Wakil ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah memberikan apresiasi atas capaian kinerja sektor pertanian yang sangat tinggi. Beliau juga menyampaikan apresiasinya secara langsung kepada Mentan Amran atas hasil riil dalam mensejahterakan masyarakat dengan penguatan sektor pertanian. "Alhamdulillah luar biasa Pak Menteri yang sudah menyampaikan capaian yang riil agar masyarakat kita punya gading pengaman yang kuat di tingkat bawah, juga standing capaian sektor pertanian sudah sangat tinggi," ungkapnya dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Jakarta, Selasa (24/9/19).

Fahri menambahkan, rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Kementan untuk seluruh kerja kerasnya. Dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI yang berlangsung hingga sore hari dengan sambutan serta tanggapan yang membangun dari hadirin rapat, DPR beserta pemerintah juga berhasil mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) pertanian menjadi UU diantaranya Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan serta RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam rapat tersebut, Mentan Amran juga turut memberikan sambutan. Untuk RUU tentang Sistem Budi

Daya Pertanian Berkelanjutan, dia menginformasikan beberapa substansi yang diatur dalam RUU ini antara lain merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 99/PUU-X/2012 yang mengecualikan petani kecil dari perizinan dalam melakukan pencairan dan pengumpulan sumber daya genetik. Lebih lanjut Amran menyampaikan jika UU ini ditujukan untuk melindungi petani Indonesia. "Intinya itu sangat melindungi petani," ungkapnya.

NTP Agustus Naik

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut positif rilis terkini Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Hal ini, menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri merupakan parameter membaiknya daya beli atau kesejahteraan petani. "Ini merupakan dampak dari produksi yang meningkat secara signifikan hampir pada semua komoditas pertanian. Data BPS menjadi bukti pembangunan pertanian kita berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani," ujarnya.

Kuntoro mengomentari rilis BPS yang mencatat NTP secara nasional mengalami kenaikan 0,58 persen pada Agustus 2019 (103,22) dibandingkan bulan lalu 102,64. Menurut Mentan, tren NTP ini terus membaik sejalan dengan peningkatan produktivitas pertanian.

"Bila dibandingkan dengan riset Bappenas, maka data BPS ini punya korelasi positif. Bappenas mengatakan program Kementan memacu pertumbuhan ekonomi



daerah. Ini bukti kerja keras Kementan membuah hasil positif," tegas Kuntoro.

BPS menyebutkan neraca perdagangan pada Agustus 2019 tercatat positif atau mengalami surplus. Komoditas hasil pertanian disebut berperan besar dalam menyumbang surplus neraca perdagangan Agustus 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, nilai ekspor Indonesia dari pertanian sebesar USD 0,34 miliar. Perubahan ini tercatat positif, month to month sebesar 7,70 persen dan secara year on year naik 12,0 persen. "Struktur ekspor menurut sektor dari pertanian pada Agustus 2019 menyumbang 2,37 persen," jelasnya, Senin (16/9/2019).

Beberapa kontributor atas kenaikan ekspor pertanian ini adalah komoditas sayur-sayuran, hasil ikan, bandeng, dan sarang burung. "Selain itu juga masih didorong pertumbuhan tanaman obat, aromatik, cengkeh, dan hasil hutan bukan kayu lainnya," terang Suhariyanto.

Kementan saat ini terus berupaya mendorong

peningkatan ekspor pertanian. Akselerasi ekspor pertanian diantaranya dilakukan dengan membenahi semua layanan perizinan.

Kurangi Kemiskinan

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Ketut Kariyasa mengatakan, setiap tahun pemerintah berhasil menurunkan penduduk miskin secara signifikan. Penurunan ini tak lepas dari berbagai kebijakan dan program terobosan yang dikeluarkan oleh Kementan. "Keberhasilan ini bahkan tidak perlu diragukan lagi karena dari tahun ke tahun angkanya bisa dilihat bersama. Pada Maret 2013 misalnya, jumlah penduduk miskin saat itu masih sekitar 11,36 persen atau 28,17 juta jiwa dari total 248 juta jiwa penduduk Indonesia. Namun angkanya terus berangsur turun hingga menyentuh satu digit atau 9,82 persen," katanya, Rabu (4/9/2019).

Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 turun menjadi 9,41 persen atau sekitar 25,14 juta jiwa dari total 267 juta jiwa penduduk Indonesia.

Sementara itu, Kementan menjadikan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera 2019 (#Bekerja) sebagai andalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan diharapkan program ini mampu menjadi pengungkit pemberdayaan rumah tangga miskin di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Agung Suganda, kepala Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) dalam acara Pendistribusian Perdana Bantuan Program Bekerja di Lapangan Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (19/9/2019).

"Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, ada 5.229 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) di Kabupaten Malang yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan Bekerja 2019, berupa 50 ekor ayam Joper, 150 kg pakan dan obat-obatan untuk masing-masing RTMP," jelas Agung. **(tim humas)**



TERIMA KASIH PETANI, SELAMAT HARI TANI NASIONAL

Oleh : *Kuntoro Boga Andri**



HARI Tani Nasional yang jatuh pada 24 September, bermula dari ditetapkannya Undang-Undang (UU) No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) oleh Presiden RI Soekarno. Di dalamnya ditegaskan soal pelaksanaan *eland reformi*. Land-reform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum tani.

Sebuah keberpihakan yang nyata dan penghargaan pemerintah pada petani sebagai *epahlawan pangan*.

Sematan petani sebagai pahlawan pangan tidaklah berlebihan. Pangan merupakan kebutuhan primer umat manusia dan petani memiliki peranan penting sebagai penyedia pangan. Peranan petani ke depannya akan semakin penting dengan kebutuhan pangan yang juga meningkat. Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan menyebut ketahanan pangan di masa depan terancam karena serangan hama, alih fungsi lahan, hingga perubahan iklim.

Di saat yang sama, pertumbuhan jumlah penduduk melaju begitu cepat. Benua Asia saja, diperkirakan menjadi rumah bagi 4,9 miliar orang pada 2030. Ini akan mengakibatkan peningkatan konsumsi pangan lebih dari dua kali lipat per kapita dalam 12 tahun mendatang.

Meningkatnya kebutuhan pangan dunia seharusnya menjadi peluang besar. Tapi fakta menunjukkan jumlah rumah tangga petani justru menurun. Jumlah petani kita pada 2019 hanya tersisa 27 persen dari total angkatan kerja, dibandingkan angka 57 persen pada 1970-an.

Bangsa yang Berpihak pada Petani

Di setiap masa, para pemimpin bangsa secara nyata berpihak kepada petani. Wujud keberpihakan ditunjukkan dengan upaya menyejahterakan kaum tani, membela hak-hak petani, dan mengangkat harkat dan martabat para petani.

Di era penjajahan, ideologi Marhaenisme lahir. Melalui ideologi tersebut, Soekarno sebagai pencetusnya secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pekerja di sektor pertanian. Dalam beberapa pidatonya, Soekarno menyampaikan misinya untuk menjadikan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan pemberdayaan *wong cilik* sebagai ideologinya. Hal itu terucap dalam pernyataan Presiden RI Soekarno pada peresmian Kampus Fakultas Pertanian UI di Barangsiang Bogor pada 1952 yang menyatakan, *“Pertanian adalah soal hidup matinya sebuah bangsa”*.

Tokoh bangsa lainnya, Ulama Besar dan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Ashari juga menegaskan, keberpihakan dan kepeduliannya terhadap petani. Mengutip tulisan Muntaha dari kitab *Amalil Khuthaba*, beliau mengingatkan petani adalah benteng terakhir bagi pertahanan negeri.

Di masa Orde Baru, Presiden Suharto menjadikan Pertanian sebagai sektor utama dalam Rencana Kerja Pembangunan Lima tahunannya (Repelita). Sejak Repelita I sampai dengan V, pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama.

Saat ini, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keberpihakan kepada petani ditunjukkan dengan menjalankan dan mengawal program strategis yang dapat mendongkrak secara efektif kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan dan penyokong utama kedaulatan pangan Indonesia.

Hadir untuk Petani

Selama lima tahun terakhir, Kementan di bawah komando Andi Amran Sulaiman mengakselerasi mekanisasi pertanian yang bermuara pada upaya mewujudkan pertanian modern. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terus digenjut dalam upaya tingkatkan efisiensi dan efektifitas budidaya pertanian secara keseluruhan, meliputi kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, dan pengolahan hasil pertanian.

Mekanisasi pertanian dipercaya dapat mengatasi persoalan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dan juga turut meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan kajian, mekanisasi mampu tingkatkan efisiensi usaha tani antara 35-48 persen. Sebagai bentuk pengawalan, Kementan membentuk Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sehingga kelembagaan

pengelolaan alsintan bisa semakin kuat.

Selain infrastruktur dan modernisasi pertanian, SDM juga menjadi faktor penting dalam menjaga kemandirian pangan. Kementan menargetkan mencetak 1 juta petani muda atau milenial yang tergabung dalam sekitar 40.000 kelompok tani milenial, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

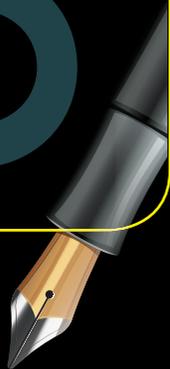
Menaruh perhatian pada petani milenial menjadi penting jika mengingat hasil kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2015 menyimpulkan bahwa hanya 54 persen anak petani tanaman pangan yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya, sementara 46 persen menolak. Pada petani hortikultura, persentasenya lebih timpang lagi. Sebanyak 63 persen menolak mewarisi profesi orang tuanya dan hanya 36,7 persen yang bersedia melanjutkan usaha tersebut.

Salah satu alasannya, generasi muda merasa asing dari dunia pertanian karena mengaku mengetahui informasi soal pertanian secara otodidak. Sebanyak 64 persen mengaku tidak pernah diajarkan soal pertanian oleh orang tua. Alasan utamanya lantaran generasi muda masih menanggapi karena petani sebagai pekerjaan. Bukan bagian dari aktivitas kewirausahaan. Petani sebagai sebuah pekerjaan tentu tidak menjanjikan keuntungan besar. Apalagi jika hanya mengerjakan lahan orang lain dengan upah dari tuan tanah.

Kementan telah berupaya untuk menarik minat generasi muda terjun ke dunia pertanian dan mendekatkan konsep petani dengan kewirausahaan. Kementan menata ulang konsep petani melalui *agropreneur*. Dalam konsep petani sebagai *agropreneur*, petani tidak hanya menjadi *ëburuhí*, tapi menjadi pemilik usaha tani. Sebagai *agropreneur*, petani tidak hanya berkutat di aspek hilir (produksi), tapi didorong untuk turut menguasai aspek hulu (pengolahan) sebagai sebuah sistem agribisnis.

Petani milenial ini akan sangat berbeda dengan petani tradisional. Jika petani tradisional identik dengan metode konvensional dan pekerjaan kotor, maka petani milenial telah tanggap teknologi digital dan alsintan, serta fasih mengadopsi teknologi dalam beragam aspek bisnis. Dengan karakteristik tersebut, para petani milenial akan mampu membawa pembaruan dalam pembangunan pertanian ke depan.

Untuk lahirkan para petani milenial, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mencanangkan program Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial seraya menguatkan tiga pilar, yaitu penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.



Hasil Kerja Petani

Di tengah rongrongan minimnya regenerasi, apresiasi patut diberikan kepada petani Indonesia. Kinerja sektor pertanian Periode 2014-2018 terlihat sangat memuaskan dan membangkitkan optimisme. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian naik Rp400 triliun sampai Rp500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp1.370 triliun. Peningkatan PDB pertanian pada 2018 dibanding 2017 sebesar 3,7 persen telah mampu melebihi target pemerintah sebesar 3,5 persen. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.

Dalam periode ini, harga di tingkat petani membaik, sedangkan harga di konsumen menurun dan cenderung stabil. Petani menjadi lebih sejahtera dengan fakta angka Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) membaik, serta tingkat kemiskinan di desa menurun. Dari sisi inflasi pangan, pada Periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1 persen, dari 10,57 persen (pada 2014) menjadi 1,26 persen (pada 2017), dan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ini berkat upaya memperpendek rantai pasok, pasar lelang, e-commerce, Toko Tani Indonesia (TTI), satgas pangan, dan sebagainya.

Peningkatan ekspor komoditas pertanian mencapai 10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Bahkan jika diakumulasikan, total ekspor selama empat tahun ini mencapai Rp1.764 triliun. Bahkan data yang dirilis BPS pada 24 Juni 2019, nilai ekspor pertanian naik 25,19 persen dibandingkan tahun lalu (year on year) atau senilai USD 0,32 miliar. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di bidang pertanian terus meningkat sejak 2013. Realisasi investasi tercatat tumbuh signifikan sebesar 110,2 persen dalam lima tahun, yakni dari Rp29,3 triliun (2013) menjadi Rp 61,6 triliun (2018).

Semua yang disampaikan di atas, menjelaskan bahwa Indonesia telah mandiri pangan dan kita tetap optimistis dapat menjaganya dengan kerja keras dan melanjutkan upaya yang sudah dilakukan. Selamat Hari Tani Nasional!

** Kepala Biro Humas dan Informasi Publik,
Kementerian Pertanian*

HARI KUNJUNG PERPUSTAKAAN DAN KAKI PALSU

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) menggelar kegiatan bakti sosial penyerahan kaki palsu di ruang pelayanan perpustakaan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

“Kaki palsu ini diserahkan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Kami menyerahkan dan meluncurkannya melalui kerja sama Kick Andy Foundation dan Angkasa Pura 2,” ujar Kepala Pustaka Kementan Retno Sri Hartati Mulyandari, Kamis (26/9/2019).

Dia menjelaskan, penyerahan kaki palsu ini dilakukan dengan cara online, yakni melalui media sosial (medsos). Jadi, para penerima lebih dulu harus melakukan login pendaftaran di medsos yang tersedia. Selanjutnya, Pustaka akan melakukan cek dengan melihat identitas dan foto yang tertera.

“Pengumuman dilaksanakan sejak awal Mei sampai akhir Juli 2019. Alhamdulillah jumlah pendaftar dari seluruh Indonesia mencapai 120 orang. Tapi atas pertimbangan biaya transportasi, penginapan, dan arahan Kick Andy Foundation, akhirnya kami memilih penerima yang berdomisili di Jabodetabek sebanyak 23 orang,” katanya.

Retno menambahkan, seluruh penerima kaki palsu dan pendampingnya diundang dalam kegiatan open house Hari Kunjung Perpustakaan untuk diberikan kaki palsu secara simbolis. Dalam kegiatan tersebut, hadir diantaranya perwakilan Kick Andy Foundation Ali Sadikin.

“Kemudian para penerima bantuan juga diberi pengetahuan literasi informasi teknologi pertanian supaya dapat memenuhi kebutuhan informasinya penunjang aktivitas dan peningkatan kesejahteraan hidup,” ujarnya.

Lebih dari itu, lanjut Retno, mereka juga dibekali pengetahuan keterampilan mengaplikasikan teknologi tepat guna secara mandiri. Upaya ini sebagai perhatian Kementan dalam mendorong kemampuan penyandang defabel.

Sementara itu, perwakilan Kick Andy Foundation Ali Sadikin menyampaikan bahwa



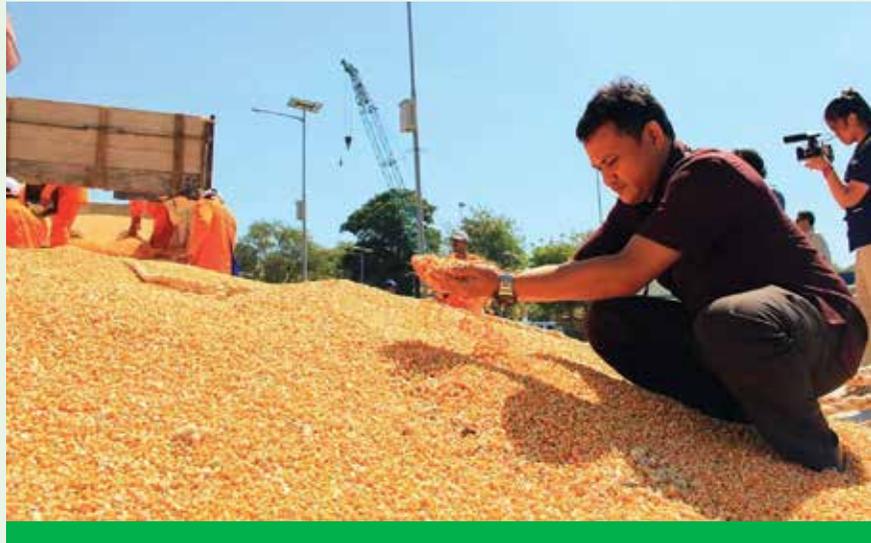
kegiatan ini merupakan salah satu dari sekian banyak bantuan CSR yang dimiliki oleh Kick Andy Foundation.

Ali mengungkapkan awal mula kerja sama dengan Kementan adalah karena ketertarikan Andy F. Noya, presenter Kick Andy dengan perpustakaan dan literasi pertanian.

“Sampai pada akhirnya terjalin kerja sama dengan Kementan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Kementan yang menjadi jembatan harapan dan motivasi bagi difabel untuk bisa hidup lebih baik,” tandasnya.

Rencananya, ke depan Kick Andy Foundation juga akan mengajak Kementan untuk melanjutkan kerja sama Program Satu Hati Cerdaskan Bangsa dengan membagikan buku bacaan gratis ke seluruh perpustakaan kecil dan perpus keliling Indonesia. “Semoga ke depan kita terus meningkatkan kerja sama sosial seperti ini,” tukasnya. **(tim humas)**

SEMBILAN JURUS PRODUKSI JAGUNG RAUP Rp1 TRILIUN



DI musim kemarau, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) tetap mampu memproduksi jagung dan hingga saat ini, luas tanamnya mencapai 31 ribu hectare (ha). Varietas jagung yang dipanen, yakni Nakulaa Sadewa (Nasa) SinKembar Tongkol, hasilnya mampu meraup Rp1 triliun.

“Usaha tani di jagung ini cukup menjanjikan, perputarannya bisa mencapai Rp1 triliun. Hitungannya biaya produksi per hektare mencapai 15 juta dengan provitas sembilan ton per hektare, di sini minimal tujuh ton per hektare. Jadi bila satu kilogram jagung butuh biaya produksi Rp1.600 kemudian harga jualnya Rp3.800, maka ada sisa keuntungan Rp2.200 per kilogram,” ujar Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi saat panen raya jagung varietas Nakulaa Sadewa (Nasa) SinKembar Tongkol di Desa Joho Kabupaten Nganjuk, Jumat (6/9/2019).

Dia menyatakan, dengan pendapatan Rp30 juta per hektare, bila dikalikan luas 31 ribu hektare, maka perputaran bisa mencapai hampir Rp1 triliun dan

keuntungan bersihnya Rp700 miliar.

Menurutnya, besarnya hasil yang diraup panen jagung tersebut karena petani sudah mulai menerapkan sembilan jurus sebagai solusi permanen dalam mengatasi kenaikan harga input dan penurunan harga output (jual). “Di sisi lain, kami apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan TNI selama ini,” ujarnya.

Terkait harga jagung, Suwandi menuturkan, ada solusi permanen dalam mengatasinya. Harga naik atau turun itu bukan penyebab, tetapi sebagai akibat, sehingga petani jangan mempermasalahkan akibat, jangan mengeluh. “Pemerintah ingin petani menjadi mandiri dengan mencari faktor pembentuk harga sebagai penyebabnya,” ucapnya.

Sementara itu, pada 2019 ini, Kementan mulai menginisiasi kegiatan pilot project pengembangan kawasan untuk perbenihan jagung berbasis korporasi petani. Penguatan kelembagaan kawasan korporasi





dilakukan melalui pengawalan, pembinaan dan pendampingan dalam teknik produksi benih jagung, bantuan sarana produksi, alsintan, infrastruktur dan akses pasar.

Salah satunya lokasi pilot project yang dikunjungi Dirjen Tanaman Pangan Suwandi bersama Direktur Perbenihan M. Takdir Mulyadi di Desa Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jatim pada Sabtu (7/9/2019).

Ditjen Tanaman Pangan menargetkan melaksanakan kegiatan pilot project pengembangan kawasan jagung hibrida untuk penangkaran benih berbasis korporasi petani di Tuban untuk tahap awal seluas 89,6 ha dari target nasional seluas 1.175 ha. Dari total ini, berada di tiga kabupaten, yakni di Tuban 675 ha, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 250 ha, dan Lampung Timur 250 ha.

Kementan juga terus berkomitmen untuk mendukung berbagai terobosan penyediaan benih jagung, sehingga Indonesia semakin berdaulat dalam memenuhi kebutuhan benih. Kementan mencetak penangkar benih jagung hibrida yang andal seperti halnya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).

Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Takdir Mulyadi menjelaskan, Kementan mempunyai Program Pengembangan Kawasan (Perbenihan) Jagung Berbasis Korporasi Petani. Sesuai Kepmentan No.473/2018, Minahasa termasuk dalam wilayah kawasan jagung. "Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan tiga tahap selama lima tahun," ujarnya di Jakarta, Minggu (15/9/2019). **(tim humas)**



DENGAN **DRONE** SEMUANYA LEBIH MUDAH DAN CEPAT



Tanam Padi di Lahan Rawa

TEKNOLOGI merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Di era sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sangat praktis. Ini pula yang dilakukan pada sektor pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mencetak sejarah baru dengan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sektor pertanian. Kali ini melakukan penanaman padi dengan menggunakan drone tebar benih di lahan rawa hasil Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) seluas 3.591 hektare (ha) di Desa Muara Padang, Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (4/9/2019).

Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Andi Nur Alam Syah sekaligus Penanggung Jawab Program Serasi Sumsel menjelaskan, penanaman padi seluas 3.591 ha ini merupakan bagian dari total target penanaman padi 200.000 ha seluruh Sumsel hingga pada Oktober 2019. Penanaman padi menggunakan drone ini merupakan upaya nyata percepatan tanam dan mendongkrak luas tanam di musim kemarau yang tengah berlangsung.

"Arahan Mentan Amran, Sumsel ini menjadi lumbung pangan nasional lewat optimalisasi lahan rawa, pastinya dengan Program Serasi. Tanam padi menggunakan drone itu dapat mempercepat tanam. Pengolahan lahan dan panennya menggunakan mekanisasi modern juga. Jadi pasti cepat kita bangun lumbung pangan," ujarnya

di lokasi tanam padi.

Lebih lanjut Pria asal Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini membeberkan drone penebar benih memiliki keunggulan yang mampu menebar benih untuk satu hektare lahan hanya butuh waktu satu jam dengan kapasitas 50 sampai 60 kg per hektare. Namun jika dibandingkan dengan cara manual, memakan waktu cukup lama dan tenaga kerja yang banyak. "Kalau tebar padi manual itu, per hektarenya butuh waktu empat jam yang dikerjakan satu orang. Jadi perbandingannya cukup jauh, bahkan biaya lebih efisien," bebernya.

Andi Nur Alam menambahkan, drone penebar benih ini juga mampu bekerja mandiri sesuai pola atau alur yang sudah dibuat pada perangkat android dan dipandu oleh GPS (Global Position System). Drone ini mampu melakukan *resume operation*, sehingga operation yang tertunda dapat dilanjutkan kembali. Jadi tidak terjadi overlap dalam penanaman dan dilakukan secara otomatis. "Ketahanan baterai mampu operasi selama 20 menit dengan kapasitas angkut maksimal enam kilogram benih padi," ungkapnya.

"Dengan demikian, adanya percepatan tanam ini membuat optimal kerja alsintan seperti traktor dan eskavator. Awalnya hanya bekerja delapan jam per hari menjadi 16 jam per hari. Yang lebih penting lagi semangat petani semakin berkobar bekerja," sambungnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian



Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Ilfantria menegaskan, dengan adanya kegiatan Program Serasi Kementan, petani semakin semangat dan optimistis meningkatkan produksi dan pendapatan. Ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam mengurangi angka kemiskinan. "Adanya Program Serasi, selain bantuan alsintan modern, juga dibangun tanggul, saluran tersier, saluran konektivitas, pompa dan pintu air. Apalagi setelah kedatangan Pak Menteri minggu lalu, benar-benar membakar semangat petani untuk bekerja lebih giat," tegasnya.

Di tempat terpisah, Kementan mendukung Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Kabupaten Sejuta Rawa Provinsi Papua. Julukan ini diberikan untuk Kabupaten Mappi karena memiliki potensi besar pengembangan pertanian dengan luas lahan basah (rawa) sekitar 1 juta ha. Secara geografis, letak Kabupaten Mappi sangat strategis di wilayah Papua bagian selatan dan berada di antara empat kabupaten, yakni Timika, Asmat, Bovendigul, dan Merauke.

Melihat potensi tersebut, tim Kementan melakukan kunjungan bersama Bupati Mappi di beberapa kecamatan pada 9 September 2019 beberapa hari lalu. Tim Kementan diwakili Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Takdir Mulyadi. Kunjungan tersebut juga sebagai tindak lanjut pertemuan dari Menteri Amran dengan Bupati Mappi.

Takdir Mulyadi menyatakan, Kementan mendukung penuh pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Mappi. Kementan akan mengalokasikan bantuan benih padi, benih jagung, pompa air dan alsintan yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan kegiatan budidaya pertanian serta dominasi lahan basah dan rawa. "Tentu kami akan mendukung dan mengupayakan semaksimal mungkin asalkan petani juga bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Karena itu, untuk mempercepat realisasi program pengembangan pertanian di kabupaten sejuta rawa tersebut, Takdir meminta pemerintah Kabupaten Mappi yang mempunyai sekitar 1 juta hektar lahan basah/rawa agar dioptimalkan. Kementan memiliki Program Selamat Rawa Sejahterakan Petani atau yang dikenal dengan 'Serasi'. "Program ini, saya rasa bisa dilaksanakan di Kabupaten Mappi, sehingga wilayah ini dapat turut ambil bagian menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2024," tandasnya. **(tim humas)**

KAMBING BOERKA GALAKSI AGRINAK YANG MENGUNTUNGKAN

BERUBAHNYA preferensi konsumen untuk mendapatkan daging yang empuk dan dengan perlemakan yang rendah, menuntut peternak harus menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk itu, perlu dihasilkan ternak yang cepat tumbuh. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan persilangan kambing lokal Indonesia (Kacang) dengan pejantan unggul kambing Boer.

Kambing Boerka Galaksi Agrinak merupakan rumpun kambing tipe pedaging baru hasil pemuliaan yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) melalui Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih. Rumpun kambing ini dapat beradaptasi pada berbagai kondisi agroekosistem dan memiliki bobot badan yang lebih tinggi dibanding dengan kambing lokal. Pembentukan rumpun Kambing Boerka Galaksi agrinak dimulai sejak 1998.

Rumpun kambing Boerka Galaksi Agrinak dengan komposisi genetik 50 persen boer dan 50 persen kacang, mempunyai warna tubuh dominan seragam, yaitu campuran putih dan coklat pada daerah leher dan kepala, dan lebih besar dibanding kambing Kacang.

Hasil perbanyak populasi dan uji multilokasi pada kambing Boerka Galaksi Agrinak dengan manajemen standar yang dilaksanakan pada berbagai kondisi agroekosistem, tetap menunjukkan performa yang stabil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata bobot lahir sampai umur satu tahun relatif seragam dan meningkat. Perbandingan dari generasi pertama dan generasi ke empat, rata-rata bobot lahir dari 2,52 sekitar 0,36 kg menjadi 2,64 sekitar 0,39 kg; rata-rata bobot sapih dari 10,24 sekitar 1,43 kg menjadi 10,44 sekitar 1,34 kg, rata-rata bobot enam bulan dari 13,01 sekitar 1,92 kg menjadi 17,98 sekitar 1,49 kg; dan bobot umur satu tahun dari 22,49 sekitar 3,33 kg menjadi 23,85 sekitar 1,99 kg.

Memanfaatkan kambing Boerka Galaksi Agrinak untuk usaha penggemukan adalah usaha yang menguntungkan. Hasil analisis kelayakan usaha menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan pakan lengkap berbasis produk samping perkebunan sawit, diperoleh pendapatan sebesar Rp 3.300,00 per ekor per hari.





Hasil perhitungan produktivitas induk menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas induk dari 17,54 kg pada kambing Kacang meningkat menjadi 20,52 kg pada kambing Boerka. Sedangkan laju reproduksi induk Boerka sebesar 1,79 ekor per induk per tahun tidak berbeda dengan laju reproduksi pada kambing Boer dengan bobot badan umur 1 tahun mencapai 35 kg.

Tujuan pembentukan rumpun Kambing Boerka Galaksi Agrinak ini adalah untuk menghasilkan rumpun kambing potong unggul dengan pertumbuhan yang tinggi, sehingga bobot potong optimum bisa dicapai pada umur muda. **(tim humas)**

Melon Unggul Kanaya Rasa Renyah

SUKA makan buah melon? Terutama ketika cuaca sedang panas makan buah melon dingin pasti menyegarkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) telah menghasilkan teknologi varietas tanaman buah melon unggulan, yaitu Melon Hibrida Varietas Kanaya.

Melon hibrida ini memiliki bentuk bulat dan berwarna oranye. Keunggulannya adalah memiliki bobot buah 1,5-1,8 kg per buah, ketebalan jala kulit buah 91-93 persen, bentuk jala segitiga dan segilima teratur, dan ketebalan daging 4.5 cm.

Dilepas pada 2005 silam, melon ini memiliki

rasa daging yang manis (170 Brix) dan renyah, beraroma kuat serta memiliki daya simpan selama 18-20 hari setelah panen. Melon Kanaya mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah sampai medium dengan ketinggian 0-700 mdpl (meter di atas permukaan laut). Varietas unggul ini potensial dikembangkan oleh industri benih hortikultura. **(tim humas)**



DISKUSI HANGAT DI TENGAH SANTAP SIANG

Mentan Amran Jamu BEM Pertanian Se-Indonesia

“HIDUP Pertanian Indonesia! Hidup Pak Menteri! Hidup Petani Indonesia! Hidup mahasiswa!”. Berkali-kali teriakan para mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 150 orang bergema saat berjumpa Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

Kali ini Mentan bersantap siang bersama para mahasiswa, sekaligus memberi kesempatan bagi para mahasiswa berdiskusi dan bertanya berbagai topik pertanian, termasuk seputar RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang baru disahkan oleh DPR RI.

Mentan menegaskan bahwa RUU tersebut memiliki keberpihakan tinggi pada petani kecil. Persoalan isu negatif yang mengiringi pengesahan RUU tersebut, menjadi pertanyaan para mahasiswa. “RUU ini disusun selama tiga tahun dengan mempertimbangkan memberi keuntungan besar bagi petani kecil. Jadi jangan dibalik logikanya,” kata Amran.

Dia mengatakan, komunitas petani kecil yang dianggap akan susah berkembang dan mudah di pidana, adalah logika yang salah. Malah sebaliknya, petani kecil tidak perlu lagi mendaftarkan benihnya sepanjang digunakan

bagi komunitasnya dalam area satu kabupaten. Menurut Mentan bila sudah disebar level nasional, maka sudah disebut pengusaha, dan bukan lagi petani kecil.

Diskusi yang cukup hangat dan menarik ini, memberikan pemahaman yang cukup bagi para mahasiswa ditengah polemik RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, selain juga diskusi seputar produksi ternak, penyakit jagung, hingga cara menangani hama tikus.

Hasbi Abdullah, ketua Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia merasa komunikasi yang baik dari pemerintah, dan sangat senang Mentan tidak sulit ditemui mahasiswa. Kontrol yang baik dan konstruktif dari mahasiswa akan terus dilakukan, sebagai identitas mahasiswa dan menjaga kepekaan terhadap kondisi masyarakat petani.

“Forum dialog dan diskusi seputar isu hangat kami minta terus terbuka seperti saat ini,” pinta Hasbi mewakili rekan-rekannya dan disambut teriakan, “Hidup Pak Menteri!”.

Di tempat terpisah, Ketua Buruh Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah Nukman Iskandar mendukung upaya Kementan dalam mengembangkan program pertanian yang bermuara pada





RUU ini disusun selama tiga tahun dengan mempertimbangkan memberi keuntungan besar bagi petani kecil. Jadi jangan dibalik logikanya.”

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian RI



kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi untuk pendampingan demi meningkatnya kesejahteraan petani,” ujarnya usai bertemu Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menurut Nukman, kolaborasi ini antara lain mengajak generasi muda untuk mengentaskan masalah pertanian seperti penggunaan mekanisasi yang mulai diterapkan pemerintah selama lima tahun terakhir.

“Kerja sama yang intensif dan membangun pertanian itu tidak sehari dua hari, mungkin akan dirasakan 34 tahun berikutnya kita berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk saling menguatkan dalam membangun pertanian,” katanya.

Nukman menjelaskan, kerja sama ini dibangun lantaran Kementan dibawah pimpinan Amran Sulaiman sukses mengimplementasikan visi besar swasembada dan menjalankan road map Indonesia lumbung pangan dunia.

“Kita akan terus berkomunikasi dengan pak menteri terkait apa saja yang bisa kita bantu untuk pengembangan atau pembangunan pertanian ke depan. harapannya kerjasama kolaborasi yang kita lakukan tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi terus berlanjut sampai nanti,” katanya.

Lebih dari itu, Nukman menyebut kerja sama Kementan dengan lembaga lain merupakan pembuktian kongkrit bahwa keberpihakan Mentan Amran kepada petani cukup besar. Di samping itu, dia mengapresiasi pada kebijakan anggaran kementan yang sebagian besar digunakan untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana petani.

“Kalau dulu kita melihat anggaran yang biasanya hanya untuk rapat, sekarang pak Mentan mengubahnya mejadi alokasi sarana dan prasarana pertanian hingga 85 persen. Dengan kebijakan ini dampak terhadap masyarakat lebih besar,” katanya.

Secara garis besar, lanjut Nukman, PP Pemuda Muhammadiyah bersama Kementan sepakat memberdayakan petani dalam mengolah pembibitan ternak dan domba. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan menggerakkan para ahli yang ada dibawah struktur organisasinya.

“Di Pemuda Muhamamdiyah kita sudah menghimpun ahli-ahli peternakan domba. Kita juga sudah punya ahli penggemukan dan juga breeding. Kita memiliki berbagai ahli yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapanya tentu saja bisa menjadi kekuatan untuk membangun sektor pertanian Indonesia,” katanya.

(tim humas)

JADI PANGAN ALTERNATIF, KEMBANGKAN SORGUM DAN GANDUM

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2020 meluncurkan program bantuan benih pangan alternatif. Salah satu pangan alternatif itu adalah tanaman sorgum. "Sorgum salah satu tanaman yang akan kita alokasikan bantuan benih, karena tanaman ini banyak manfaatnya," ujar Direktur Serealia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Kementan Bambang Sugiharto di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Salah satu pelaku usaha yang giat membudidayakan sorgum ada di Lamongan, Jawa Timur (Jatim), namanya Rumah Sorgum Indonesia. Unit usaha yang berdomisili di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini memulai usahanya pada 2016 dan pada 2019 mendapatkan izin

resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.

Menurut Esti Faizah, seorang penyuluh yang juga aktif di Rumah Sorgum, berdirinya unit usaha ini dilatarbelakangi melimpahnya produksi biji sorgum di wilayah tersebut. "Saat panen raya biasanya harganya anjlok, karena petani hanya jual bentuk biji saja, trus muncullah ide kami mengolahnya jadi pangan lokal sehat biar meningkat nilai ekonomisnya," tutur Esti.

Untuk harga, sorgum segar bisa mencapai sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000 per kg. Apabila diolah menjadi produk makanan tentu punya nilai tambah lagi.

Perlu diketahui sorgum atau yang dikenal dgn nama





Sorghum salah satu tanaman yang akan kita alokasikan bantuan benih, karena tanaman ini banyak manfaatnya.”

Bambang Sugiharto

Direktur Serealia Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Kementan

latin (*Sorghum bicolor* (L.) Moench pada 1970 sudah mulai banyak di budidayakan di Indonesia. Tercatat ada sekitar 15 ribu hektare (ha) tersebar di Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini.

Hampir seluruh bagian tanaman sorgum, seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Mulai menjadi makanan seperti sirup, gula, kerajinan tangan, pati, biomas, bioetanol dan tepung pengganti terigu dan lainnya.

Kepala Seksi Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain Ditjen Tanaman Pangan Kementan Ahmad Yusuf mengatakan, daerah penghasil sorgum dengan pola pengusahaan tradisional terdapat di daerah Purwodadi, Pati, Demak, Wonogiri, Gunung Kidul, Kulon Progo, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Probolinggo. “Pada 2020 sudah kita alokasikan 5.000 ha. Ini bukti keseriusan kami mengembangkan sorgum,” kata dia.

Di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sorgum juga mendapat perhatian dari Kementan untuk dikembangkan budidayanya. Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, petani di Desa Raji Kabupaten Demak sudah turun temurun, sehingga puluhan tahun menanam sorgum. Secara total, luas budidaya sorgum se Kabupaten Demak sebesar 80 ha dan benih sorgum yang ditanam yakni varietas lokal dengan umur panen hingga tiga bulan.

“Sorghum rata-rata ditanam pada Musim Tanam III atau musim kering. Saat ini Musim Tanam III sedang berakhir akan segera panen. Produksinya bisa delapan hingga sembilan ton per hektare (ha). Harga sorgum Rp5.000 per kilogram. Jika produksi 8 ton saja, maka hasil panen petani sebesar Rp40 juta per ha. Dengan biaya produksi Rp 7 juta per ha, maka pendapatan petani 33 juta per

musim (tiga bulan, red). Artinya pendapatan petani per bulan sebesar Rp11 juta,” ujarnya saat meninjau tanaman sorgum di Desa Raji tersebut, Jumat (27/9/2019).

Selain sorgum, Kementan juga melirik pengembangan budidaya tanaman gandum di Indonesia Timur, khususnya wilayah NTT dan Papua. Pengembangan komoditas ini penting untuk meningkatkan dalam negeri yang masih kurang dan juga karena semakin meningkatnya tren masyarakat masa kini untuk mengkonsumsi aneka roti dan mie, maka kebutuhan tepung nasional juga meningkat.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Bambang Sugiharto menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan gandum ini diperlukan penyediaan varietas yang mempunyai sifat unggul dan beragam. Ketersediaan plasma nutfah yang memiliki variasi yang besar merupakan sumber gen yang mendukung pembentukan varietas baru yang berdaya hasil tinggi, tahan hama penyakit, umur genjah dan sifat lainnya.

“Prospek pertanaman gandum cukup baik karena beberapa wilayah di Indonesia cocok untuk pengembangan gandum mulai dari dataran tinggi sampai sedang, pada daerah tertentu, seperti NTT dan sebagian Papua yang memiliki iklim mikro yang cocok untuk pertanaman gandum,” jelas Bambang di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Berdasarkan data Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementan, potensi pertanaman gandum paling besar di Papua sekitar 976 ribu ha, di NTT bisa dikembangkan sampai 52 ribu ha. “Tapi memang sampai saat ini kedua wilayah tersebut belum terdata hamparan gandumnya karena masih spot kecil,” sebut Bambang. **(tim humas)**



TARGET

10 PABRIK
TERCAPAI,

KONSUMSI GULA
TERPENUHI



PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) No 91/2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya 'Penguasa dan Birokrat' menjadi 'Pelayan Masyarakat'.

"Ada empat hal penting yang akan dilakukan Kementan. Pertama, pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Kementan. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS)," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan Kasdi Subagyo di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Khusus untuk gula, lanjut Kasdi, investasi pada sektor gula sudah dimulai sejak 2014, bahkan sekarang sudah ada sepuluh pabrik gula tambahan dan tujuh di antaranya sudah mulai beroperasi. "Kita akan penuhi kebutuhan konsumsi nasional gula setidaknya perlu pasokan sebanyak 2,8 juta ton per tahun. Saat ini, kemampuan produksi gula dalam negeri baru 2,5 juta ton per tahun dan 300 ribu ton sisanya masih diimpor," katanya.

Kasdi menambahkan, saat ini sebanyak sepuluh pabrik gula baru sudah dan akan beroperasi. Nantinya pabrik-pabrik yang memiliki nilai investasi sekitar Rp43,82 triliun itu bakal menyerap tenaga kerja sekitar 2 juta pekerja. "Jika sepuluh pabrik gula itu beroperasi, maka total kapasitas produksi minimal mencapai 100.000 ton cane per day (TCD), dengan target tambahan areal tebu inti sebesar 94.100 hektare (ha) dan plasma seluas

103.900 ha, serta potensi produktivitas tebu rata-rata sebesar 92,5 ton per ha dan potensi produktivitas gula sebesar 8,14 ton per ha dengan rata-rata tingkat rendemen untuk sepuluh pabrik gula tersebut berkisar 8,7 persen," ujar Kasdi.

Dengan tambahan sepuluh pabrik gula baru itu, target memenuhi kebutuhan gula konsumsi dengan produksi dalam negeri sebanyak 2,8 juta ton sepertinya akan cepat terealisasi.

Berdasarkan data Ditjen Perkebunan produksi gula nasional berdasarkan hasil giling pada 2018 sebesar 2,1 juta ton, sedangkan untuk pada 2019 berdasarkan hasil taksasi pada Maret bahwa produksi gula nasional sebesar 2,5 juta ton.

"Dengan kondisi sekarang produksi gula kita masih terdapat selisih sekitar 300 ribu ton bila dibandingkan dengan hasil taksasi pada Maret 2019. Kita sudah punya tambahan sepuluh pabrik gula baru, kekurangan 300 ribu ton ini akan kita tutupi dari sepuluh pabrik gula baru," ujar Kasdi saat dikonfirmasi di Kantor Pusat Kementan, Jumat (27/9/2019).

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Ditjen Perkebunan Agus Wahyudi mengungkapkan, dari sepuluh perusahaan pabrik gula yang tujuh di antaranya sudah beroperasi, yaitu PT Laju Perdana Indah, PT Sukses Mantap Sejahtera, PT Gendhis Multi Manis, PT Kebun Tebu Mas, PT Industri Gula Glenmore, PT Adhi Karya Gemilang, dan PT Rejoso Manis Indo. Untuk dua perusahaan gula lainnya akan mulai beroperasi pada akhir Desember 2019, yaitu PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Jhonlin Batu Mandiri serta untuk PT Muria Sumba Manis akan mulai beroperasi pada Desember 2020.

Agus juga menekankan dengan tambahan sepuluh pabrik gula baru ini pihaknya semakin optimistis dapat memenuhi kebutuhan gula konsumsi. "Ke depan kita siapkan tambahan lagi sesuai dengan arahan Bapak Mentan, yaitu 15 pabrik gula tambahan pada periode 2020 sampai dengan 2024 untuk memenuhi kebutuhan gula industri sebanyak 3,2 juta ton per tahun," ujarnya.

Terkait swasembada gula pada 2024, Kasdi menyampaikan bahwa salah satu terobosan yang dilakukan Mentan Amran untuk mencapai swasembada gula, yaitu dengan memperluas lahan plasma di luar Pulau Jawa. Pemilihan areal pengembangan tebu di luar Pulau Jawa dikarenakan potensi lahan di luar Pulau Jawa masih besar. Saat ini pengembangan areal plasma sudah mulai dilakukan antara lain di Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Selatan.

"Pemerintah akan membantu dalam perluasan areal plasma melalui penyediaan lahan, pembersihan lahan, pemberian bantuan benih dan pupuk, serta bimbingan teknis," tutur Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyo, Jumat (20/9/2019). **(tim humas)**



KALTARA

JADI PENYANGGA PANGAN IBU KOTA BARU

UNTUK mendukung ibu kota negara baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dibangun pada 2024,

Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan daerah penyangga pangan. Adalah Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai penyangga pangan. Ini merupakan langkah strategis Kementan guna menyediakan pangan ibu kota baru secara berdialut atau tanpa impor.

“Kementan menyiapkan kabupaten di Kaltara menjadi penyangga pangan Ibu Kota RI yang baru. Ada tiga kabupaten yang dipilih, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan,” Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri penutupan Pekan Daerah (PEDA) II Petani-Nelayan Kaltara di Kabupaten Bulungan, Kamis (12/9/2019).

DiA menjelaskan, konsep pembangunan daerah penyangga pangan ibu kota baru, yaitu dengan Sistem Klaster. Karena itu, Kabupaten Bulungan akan dibangun menjadi sentra produksi padi, cabai, dan bawang merah.

Daerah penyangga pangan yang kedua adalah Nunukan, menjadi sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Kemudian Kabupaten Malinau menjadi sentra produksi padi dan jagung. “Kepala dinas harus aktif. Jangan sendiri-sendiri, tapi harus kerja bersama dengan semua pihak, termasuk pihak legislatif,” ujarnya.

Justan menegaskan untuk kabupaten



Kementan menyiapkan kabupaten di Kaltara menjadi penyangga pangan Ibu Kota RI yang baru. Ada tiga kabupaten yang dipilih, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan.”

Riduan Siahaan

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan

lain di Kaltara yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan ibu kota baru, bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan dalam mengembangkan produksi pertanian. Namun, Kementan juga tetap membantu, sehingga bisa juga menyediakan pangan. “Sebab, kecintaan Pak Menteri Amran kepada sektor pertanian dan petani itu sendiri sangat luar biasa. Jika kita lihat kemajuan pertanian, ada sesuatu yang diberikan Menteri Amran dibanding menteri sebelumnya. Beliau (Amran, Red) rajin turun ke lapangan,” tegasnya.

Kinerja Menggembirakan

Irjen Justan menyatakan, kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Karena meskipun anggaran Kementan 2014-2019 trennya turun 33,65 persen, sektor pertanian justru ekspor dan PDB pertanian meningkat.

Melansir data BPS, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton. “Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen,” bebarnya.

BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57 persen tahu 2014 menjadi 1,69 persen pada 2018. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 persen pada 2014 menjadi 13,2 persen pada 2018.

BKPM pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Pada 2013 hanya Rp29,3 triliun, namun pada 2018 naik menjadi Rp61,6 triliun sehingga naik 110 persen. “Karena itu, kepada para petani, banggalah menjadi petani. Banggalah bisa memenuhi pangan Indonesia, bahkan pangan kita sudah banyak diekspor,” tandasnya.

Terkait dukungan sumberdaya manusia (SDM), selain



dukungan petani, menurut Justan, Kementan juga tetap menggandeng jajaran TNI. “Jadi mari kita bersinergi membangun pertanian di Kaltara, sehingga nanti menjadi penyangga pangan ibu kota baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Justan menekankan kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016-2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK. “Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif turun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan,” tandasnya.

Hadir pada penutupan PEDANA II Petani-Nelayan ini, Asisten Daerah II Kaltara, Saiful Herman, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Nurhayati, Kepala Dinas Pertanian Kaltara, Andi Santiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, Direktur Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Amirudin Pohan.

PEDANA II Petani-Nelayan Provinsi Kaltara dihelat mulai 9 hingga 12 September 2019, dihadiri petani dan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten di Kaltara. **(tim humas)**





MEREDAM AKSI DEMO PETERNAK **ALA** MENTAN AMRAN



Urusan kebijakan itu, saya siap tanda tangan di mana saja. Dipunggung pegawai pun saya tanda tangan. Yang penting demi kalian sejahtera.”

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian RI

ADA yang menarik saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan peternak rakyat di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan) pada Kamis (26/9/2019). Ternyata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman punya cara tersendiri untuk meredam aksi dan mengambil hati para peternak yang beternak ayam broiler dan layer. Apa itu?

Saat menemui para pendemo, Mentan pasang badan dan menyakinkan akan berdiri di depan serta mengawal kebijakan agar harga ayam hidup dan telur menjadi baik dan stabil. Dalam dialog antara peternak dan perusahaan integrasi tercapai kesepakatan dan ditandatangani semua pihak.

Memang dalam aksi itu, massa pendemo meminta dukungan pemerintah menaikkan harga ayam hidup dan telur. Para peternak dari beberapa wilayah di Pulau Jawa ini dipertemukan Mentan Amran dengan para perusahaan integrasi yang selama ini dinilai mengendalikan harga pasar.

Setelah dialog, Amran juga mengajak para peternak ayam untuk makan siang bersama. Uniknya Mentan lesehan bersama mereka di lobi Auditorium Gedung F

Kementan. Sambil menyantap makan siang dengan nasi kotak, Amran berbincang santai dengan para peternak muda. "Saya yakin kalian kelak bisa jadi peternak sukses. Tetap bersemangat ya", ujar Amran.

Dia mengaku akan terus mendukung para peternak rakyat untuk mendapatkan harga yang baik dan stabil. "Urusan kebijakan itu, saya siap tanda tangan di mana saja. Dipunggung pegawai pun saya tanda tangan. Yang penting demi kalian sejahtera," tegas Amran.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Hartono menyampaikan jika tindakan yang sudah diambil Mentan sudah sangat benar. "Yang dilakukan Pak Mentan itu tepat sasaran dan terima kasih atas respon cepatnya" tuturnya.

Sementara itu, menyikapi situasi perunggasan saat ini, khususnya terkait harga *livebird* di tingkat peternak (*farm gate*), langkah-langkah yang dilakukan Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) antara lain memastikan data yang terekam sampai September 2019, potensi kebutuhan daging ayam ras 2019 (Januari-Desember) sebesar 3.251.745 ton atau rata-rata 270.979 ton per bulan, sedangkan potensi produksi daging ayam ras 2019 (Januari-Desember) sebesar 3.829.663 ton atau rata-rata 319.139 ton per bulan.

Dari data tersebut terdapat potensi surplus sebanyak 577.918 ton atau 17.77 persen selama periode 2019. Meski demikian, dari data potensi di atas realisasi sesungguhnya sampai Agustus 2019 sebesar 2.334.042 ton atau per bulan 291.755 ton. Artinya terdapat surplus sampai saat ini sebesar 7.29 persen dari kebutuhan nasional. Dari surplus sebanyak 7.29 persen, sebenarnya sangat ideal untuk cadangan pangan khususnya daging unggas secara nasional.

Kementan terus mendorong pemenuhan protein hewani bagi masyarakat dengan produksi dalam negeri. Ini dilakukan dengan terus meningkatkan produksi ternak serta memberikan ragam pilihan protein hewani bagi masyarakat. "Masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan, seperti daging ayam ras dan lokal, daging bebek, telur ayam ras, daging kambing/domba, dan juga daging sapi/kerbau. Hampir semuanya kita sudah swasembada, dan potensi untuk diekspor. Khusus untuk daging sapi/kerbau target swasembada kita pada 2026," ungkap I Ketut Diarmita, dirjen PKH Kementan, Sabtu (14/9/2019).

Kini, upaya untuk mewujudkan swasembada daging sapi 2026 tidak sebatas hanya pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, namun juga harus disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal.

"Sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan peternakan nasional menjadi lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan," ungkap Ketut saat menghadiri Kontes Ternak Kambing PE dan Sapi Potong serta Panen Pedet Kegiatan Upsus

Siwab 2019 di Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa (17/09/2019).

Ketut seraya menegaskan dukungannya dalam mendorong upaya-upaya penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencapaian di bidang peternakan melalui Kontes Ternak.

Di lain pihak, Ditjen PKH bersama kementerian terkait berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif.

Menurut Ketut, pencegahan serta pengendalian rabies menjadi masalah bersama yang memerlukan pendekatan multisektoral untuk penanganannya. Ini karena rabies merupakan salah satu zoonosis utama dan selalu menjadi masalah kesehatan baik kesehatan hewan maupun masyarakat. **(tim humas)**



INDONESIA-ASEAN BANGUN KERJA SAMA PERBENIHAN



KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) RI menginisiasi kerja sama perbenihan antara negara-negara yang tergabung Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kerja sama tersebut berupa koordinasi perlindungan varietas tanaman sebagai basis pengembangan industri benih di seluruh kawasan ASEAN.

"Uni Eropa telah berhasil melakukan pengembangan benih dalam kawasan. Melalui lembaga The Community Plant Variety Office (CPVO), Uni Eropa melakukan koordinasi dalam perlindungan varietas tanaman. Belajar dari keberhasilan CPVO, kita harapkan bisa mengembangkan kegiatan serupa di kawasan ASEAN," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan RI Fadjry Djufray dalam diskusi terbatas High Level Study Visit on Plant Variety Protection and UPOV 1991 di Kantor CPVO Uni Eropa, Angers, Perancis, pada Senin (23/09/2019) waktu setempat.

Inisiasi yang disampaikan Pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan sambutan positif dari perwakilan Pemerintah Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Perwakilan Vietnam bahkan memastikan inisiasi pemerintah Indonesia itu akan didukung penuh pemerintahnya. Vietnam mengharapkan Indonesia akan membawa isu ini dalam forum pertemuan Menteri Pertanian ASEAN atau AMAFF.

Sebagai bagian dari rangkaian High Level Study Visit on Plant Variety Protection and UPOV 1991, Fadjry bersama rombongan turut dijadwalkan akan bertemu dengan parlemen Eropa. Dalam pertemuan nanti, pemerintah Indonesia dan parlemen Eropa akan berdialog terkait peningkatan kerja sama dalam pengembangan benih.

"Kerja sama itu terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, serta pengaturan yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan sumber daya genetik antar negara dalam menunjang kegiatan pemuliaan. Upaya ini tentunya tetap memperhatikan berbagai aturan yang ada dan menjaga kepentingan Indonesia dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya genetik di dalam negeri," terang Fadjry saat ditemui se usai diskusi.

Tak hanya bertemu parlemen Eropa, rombongan Indonesia juga akan mengunjungi sejumlah perusahaan benih yang telah berkembang di Uni Eropa. Rombongan Indonesia juga akan melakukan studi terhadap pengelolaan perlindungan varietas tanaman yang dilakukan pelaku industri perbenihan di Uni Eropa. "Studi ini sebagai basis bagi pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman serta pengembangan industri perbenihan di dalam negeri," ujar Fadjry.

Selain Perancis, High Level Study Visit on Plant Variety Protection and UPOV 1991 akan berlanjut ke negara Belanda dan Belgia. Dalam kegiatan ini, Fadjry didampingi Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) Erizal Jamal dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Balitbangtan Syafaruddin. **(tim humas)**

**Pemanfaatan Sumber Daya Pangan Lokal
untuk Mewujudkan Keanekaragaman
Pangan Keluarga**

**Pembukaan
Keynote speech :**

- Menteri Pertanian
- Direktur Jendral FAO

Panel Diskusi :

- Arah kebijakan Pengembangan Hulu Hilir Kakao dan Sagu
- Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pangan Lokal Mendukung Ketahanan Pangan
- Pengembangan Industri Modern Kakao dan Pangan Lokal Berbasis Sagu

Diskusi Kelompok :

- Kelompok 1 : Arah Kebijakan Pengembangan Kakao
- Kelompok 2 : Pengembangan Industri Modern Kakao
- Kelompok 3 : Sumber Gizi Keluarga Berbasis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Temak

Hotel Claro

Jum'at 1 November 2019

Jl.Edi Subara no.89 Lahun Dape, Kendari
Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121
Telepon : (0401)3111888

Ketentuan Peserta Seminar, Oral dan Poster

- Peserta Seminar : Dosen / Peneliti / Mahasiswa / Masyarakat pemerhati pertanian 500 orang
- Reward Seminar Kit, sertifikat
- Ruang lingkuptopik makalah : on farm (pemuliaan, perbenihan, budidaya, gulma dan HPT) ; of farm (pasca panen dan pengolahan) kebijakan sosial ekonomi
- Makalah yang masuk akan di seleksi untuk presentasi oral dan poster
- Makalah terpilih akan masuk Prosiding dan Jurnal Ilmiah sesuai persyaratan



Abstrak disampaikan paling lambat 5 Oktober 2019
pengumuman abstrak 12 Oktober 2019
Full paper paling lambat 25 Oktober 2019
Tamplate Full Paper dapat diakses <http://semnas.un-sultra.ac.id>

Pendaftaran dan konfirmasi peserta :
15 September - 15 Oktober 2019
Pengambilan formulir pendaftaran
dikirim ke email : semnas39@gmail.com

Narahubung :
- Dr. La Ode Ava, SP., M.Si (Univ Halu Oleo)
HP. 0812 4525 026
- Dr. Rustan Ari, STP. M.Si (Univ Sulawesi Tenggara)
HP. 0821 8935 7777
- Rahman Sukatman, S.Komp (Pustaka)
HP. 0822 7838 6338



Selamat Hari Tani Nasional

24 September 2019



Kalau bukan karena petani, kita ini mau makan apa, bangsa ini mau makan apa, negara manapun pasti membutuhkan makan, dan orang di manapun pasti juga butuh makan.

-Ir H Joko Widodo-
Presiden Republik Indonesia

*Pidato presiden saat Hari Tani Nasional 2017, di
Salatiga, Senin, 25 September 2017

